RENCANA KERJA

2026



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Indrakila Nomor 10 Kebumen Telp.(0287)385925, 385912
Fax. (0287)385925, Website : www.dpmptsp.kebumenkab.go.id,
Kode Pos 54311, Pos-el : dpmptspkabkebumen@yahoo.com

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah kemudian dapat dijadikan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.
(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebuman Tahun 2026 dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 berkomitmen untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RKPD dalam rencana operasional yang disusun oleh DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan rincian program kegiatan serta anggaran dalam tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Renja merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja DPMPTSP Kabupaten Kebumen disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh pegawai dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berhasil dan tidaknya pencapaian target yang telah ditentukan dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Semoga buku rencana kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, dan berguna bagi peningkatan kinerja di Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 30 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen

JONI HERNAWAN,S.T.,M.T
Pembina Utama Muda (IV-c)
NIP. 197007281998031006

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER 1

DASAR ATURAN 2

KATA PENGANTAR 6

DAFTAR ISI 7

DAFTAR TABEL 8

BAB I PENDAHULUAN 11

A. Latar Belakang 10

B. Landasan Hukum 13

C. Maksud dan Tujuan 15

D. Sistematika Penulisan 16

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP TAHUN LALU 17

A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA DPMPTSP Tahun Lalu (Tahun 2024) dan Capaian RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Kebumen 17

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen 32

C. Permasalahan dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen 36

1. Permasalahan 38
2. Isu-Isu Strategis 39

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 40

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 49

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 50

A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 50

B. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah 61

C. Program dan Kegiatan 63

D. Pencapaian Atas Tujuan dan Sasaran 72

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 71

BAB V PENUTUP 78

A. Catatan Pelaksanaan Kinerja 78

B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 79

C. Rencana Tindak Lanjut 81

DAFTAR LAMPIRAN 83

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 18

Tabel 2.2. Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM Tahun 2022-2024 20

Tabel 2.3. Kinerja Investasi dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2020 - 2024 20

Tabel 2.4. Realisasi Investasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2024 21

Tabel 2.5. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 24

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen 34

Tabel 2.7. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kebumen 41

Tabel 3.1. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2026 56

Tabel 3.2. Keselarasan Sasaran RPJMD, Prioritas Daerah Kabupaten Kebumen dengan Prioritas Nasional Tahun 2026 pada DPMPTSP Kabupaten Kebumen 57

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Kinerja Strategis DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2026 62

Tabel 3.4. Rincian Program dan Kegiatan DPMTPSP Tahun 2026 66

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 72

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Tabel 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja dengan RKPD, Renstra, Renja K/L, dan Renja Provinsi 12

Tabel 2.1. Daftar Usulan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 49

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Tabel 2.1.	Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Capaian Terhadap Renstra	30
Tabel 2.2.	Realisasi Investasi Tahun 2023-2025	35
Tabel 3.1.	Nilai PMTB dan Kontribusi PMTB terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2020-2023	52

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah serta pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas dinas menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Perumusan kebijakan di bidang penanamn modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Rencana kerja perangkat daerah memuat program dan kegiatan prioritas prioritas pembangunan yang akan dilaksananakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;

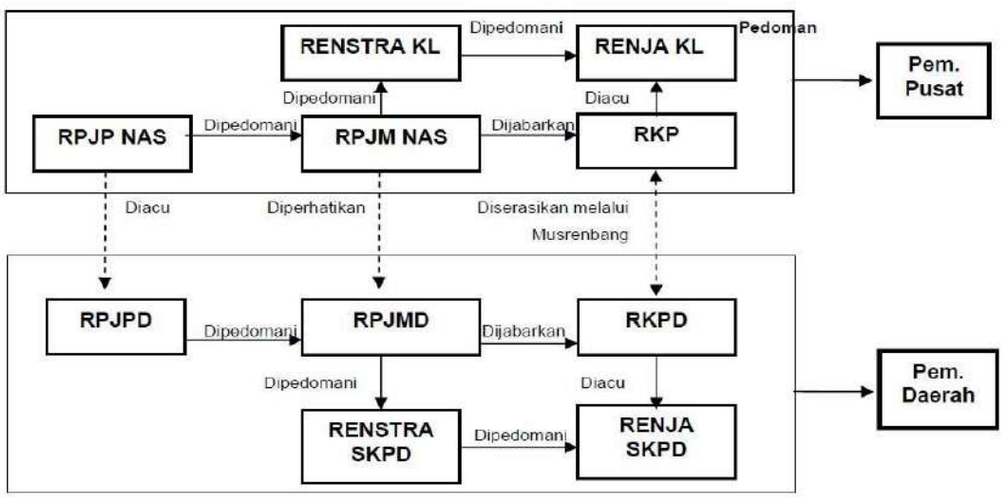
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Penyusunan rencana kerja, tidak terlepas kaitannya dengan rencana strategisnya, dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan proses penyusunan RAPBD di Kabupaten Kebumen. Dimana rencana strategis yang disampaikan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Ke bumen kepada Kepala Bappeda dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah tersebut menjadi pedoman unit kerja di lingkungan kerja dalam penyusunan rancangan rencana kerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam menyusun dokumen rencana kerja dengan mempedomani dan mengacu pada RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kebumen dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Kebumen yaitu "Kebumen Berdaya : Kebumen Beriman, Maju Sejahtera, dan Berbudaya." Dalam kerangka visi tersebut, DPMPTSP memiliki peran strategis terutama dalam mendukung Misi Kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kebumen, yaitu "Memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas serta pengembangan pariwisata dan UMKM yang inovatif dan berkelanjutan."

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk tahun 2026 adalah "pemenuhan infrastruktur dalam rangka penguatan aksesibilitas kemiskinan" yang selanjutnya menjadi tema pembangunan prioritas di tahun tersebut. Tindak lanjut dokumen rencana kerja adalah tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026.

Gambar 1.1
KETERKAITAN DOKUMEN RENJA DENGAN RKPD, RENSTRA, RENJA K/L DAN RENJA PROVINSI



Perumusan rancangan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain :

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah;

3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerahtahun lalu berdasarkan rencana strategis;
4. Menghimpun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan tujuan dan sasaran;
9. Penyiapan awal dokumen rancangan rencana kerja;
10. Penyempuranaan rancangan rencana kerja;
11. Pembahasan forum perangkat daerah;
12. Penyesuaian dokumen rancangan renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan standar pelayanan minimal.

Renja DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kinerja untuk tahun kelima periode Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian dan sasran pembengunan nasional. Selain itu, penyusunan renja mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen tahun 2026, Renja K/L dan Renja Provinis Jawa Tengah. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaiyan dengan urusan penanaman modal.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2026 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan perubahannya;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026;
29. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rencana kerja adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Kegiatan yang berjalan dan selaras dengan Rencana Strategis adalah :

1. Menentukan prioritas program dan kegiatan tahun anggaran 2026;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DPMPTSP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur DPMPTP untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2026;
4. Mengetahui indikator kinerja DPMPTSP Tahun 2026.

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan program-program kerja prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
2. Merencanakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2026;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Mengetahui masalah, tantangan, dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Jabupaten Kebumen ‘tahun 2026;
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian rencana strategis dan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen

6. Sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS, RKA OPD Tahun Anggaran 2026

D. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

Pada bagian ini terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun Lalu (Tahun 2024) dan Capaian kinerja tahun berjalan (Tahun 2025) yang mengacu pada APBD berjalan; Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

Pada bagian ini terdiri dari Tujuan dan Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi; Tujuan dan Sasaran rencana kerja; Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

Pada bagian ini berisi tentang rumusan rencana program dan kegiatan, dan subkegiatan tahun 2026 serta prakiraan maju tahun 2027 yang selanjutnya disajikan pada lampiran rencana kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Pada bagian ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran dan kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Dalam rangka penyusunan Renja Tahun 2026, tahapan evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun 2024. Evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni tahun 2026. Sebagaimana termasuk dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja DPMPTSP Kabupaten Kebumen meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2026 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan-kebijakan untuk pelaksanaan program kegiatan.

Evaluasi dilakukan terhadap capaian kinerja tujuan sasaran tahun 2024 dimana seluruh indikator kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan. Analisa capaian kinerja tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Analisa Keberhasilan/Kegagalan
1.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK (Satuan Miliar Rupiah)	405	686,76	169,57	▪ Kemudahan pelayanan perizinan secara online melalui implementasi aplikasi Online Single Submission (OSS) dari BKPM, SIMBG, MPP Digital, dan Siperi ▪ Peningkatan sarana prasarana pelayanan pada Mal Pelayanan Publik ▪ Ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait layanan perizinan berusaha pada beberapa media baik online maupun offline (Website, media sosial, baliho, sosialisasi,dll)
1.1	Meningkatnya Investasi	Persentase Peningkatan Investasi (Persen)	4,21	79,78	1.895,01	▪ Iklim investasi di Kabupaten Kebumen semakin membaik yang didukung oleh infrastruktur, ketersediaan informasi terkait lahan strategis untuk investasi, ketersediaan tenaga kerja, UMR rendah, dll. ▪ Peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM ▪ Peningkatan minat investasi melalui fasilitasi bagi calon investor ▪ Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi.

Sumber : DPMPTSP Kab.Kebumen Tahun 2025, Data Diolah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sampai dengan Tahun 2024 diperlukan sebagai dasar penyusunan Renja Tahun 2026. Evaluasi Renja Tahun 2024, serta capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Penanaman Modal dan investasi serta pelayanan publik terus mengalami peningkatan.

Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah:

1. Memaksimalkan layanan kepada masyarakat melalui sosialisasi informasi terkait fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah;
2. Pelaksanaan pengawasan penanaman modal secara intens kepada pelaku usaha sehingga laporan pelaksanaan kegiatan usaha dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan kegiatan jemput bola perizinan, dan koordinasi rutin bersama dengan tim teknis, pelaku usaha, serta stakeholder terkait seperti forum bisnis, koordinasi perizinan, forum SKM, penanganan pengaduan yang responsif, dan transparansi kegiatan maupun anggaran kepada masyarakat;
4. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Penanaman Modal dan investasi serta pelayanan publik;
5. Berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan risiko perangkat daerah, baik dalam peningkatan sarana prasarana maupun kinerja pegawai layanan dan back office dalam menjalankan kinerja yang responsif.

Pada Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang diampu. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas, dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah;
2. Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah.

Upaya pencapaian target kinerja sasaran strategis tahun 2024 seperti diatas dengan melaksanakan 5 (lima) program prioritas yang mendukung sasaran strategis tersebut, berdasarkan target kinerja program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2024, lima program prioritas yang dimaksud adalah:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Berdasarkan dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, capaian investasi sebagai komponen pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 yang mengacu pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah yang mencapain 32,98 triliun rupiah dari total realisasi investasi sebesar 77,02 triliun rupiah. Realisasi investasi tersebut mengalami kenaikan 12,59% dibanding tahun 2022 yang sebesar 68,41 triliun rupiah, rincian nilai realisasi investasi sebagai berikut :

Tabel 2.2
Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan LKPM Tahun 2022-2024

Tahun	Nilai Realisasi Investasi (Rp Triliun)				Pertumbuhan %
	PMA	PMDN		Jumlah	
		LKPM	Non-LKPM		
2022	33,9	24,99	9,52	68,41	4,4
2023	23,14	32,98	20,90	77,02	12,59
2024	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : RKPD Prov.Jawa Tengah Tahun 2026, Data Diolah

Untuk Penanaman Modal (Investasi) di Kabupaten Kebumen diharapkan mampu untuk menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, dan mampu menyediakan lapangan kerja serta berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk memperikan dampak positif pada ekonomi di daerah. Berdasarkan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 menjukan bahwa realisasi di setiap tahunnya mempunyai tren positif, melalui investasi padat karya dan investasi dengan skala yang besar. Dipengaruhi oleh memaksimalkan layanan perizinan seperti memberikan kemudahan perizinan sebagai salah satu faktor bagi investor dalam menyelesaikan dokumen kegiatan usahanya. Rincian kinerja investasi dan penanaman modal Kabupaten Kebumen tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kinerja Investasi dan Penanaman Modal
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	19,79	20,37	19,63	18,82	18,50
2.	Realisasi Investasi (Rp.Miliar)	388,644	488,529	564,646	628,230	686,760
3.	Jumlah perizinan yang dikeluarkan (Izin Terbit)	2,380	6,699	12,024	21,887	25,132

Sumber : RKPD Kab.Kebumen Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas, realisasi investasi meningkat dari tahun ke tahunnya, pada tahun 2024 sebesar 686,760 miliar meningkat 109,31% dari tahun sebelumnya yang mempunyai realisasi sebesar 628,230 miliar dari tahun sebelumnya sebesar 564,646 miliar pada tahun 2023 meningkat sebesar 111,26%. Didukungnya fasilitasi perizinan guna umkm yang telah berjalan di Kabupaten Kebumen maupun calon investor yang berminat menanamkan modalnya yang telah berbasis online yaitu melalui *Online Single Submission* (OSS). Sistem ini merupakan platform digital yang digunakan oleh Pemerintah untuk menerbitkan izin berusaha secara elektronik dan terintegrasi bagi pelaku usaha, sistem ini berbasis sistem nasional sehingga dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia dengan dikoordinasi oleh instansi masing-masing daerah. Sistem ini memiliki fleksibilitas yang tinggi dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun selama itu ada fasilitas pendukung guna mengakses laman OSS tersebut dan terhubung dengan jaringan internet yang lancar, DPMPTSP berperan sebagai tempat konsultasi jika ada pelaku usaha yang kurang memahami sistem tersebut dan memerlukan penjelasan lebih dalam.

Pada tahun 2024 target investasi di ditargetkan 405 miliar rupiah dengan angka realisasi sebesar 686,760 miliar rupiah atau tingkat keberhasilan dalam mencapai target 169,57%. Pencapaian ini didukung karena kerjasama yang baik antar bidang kerja satu sama lain, dengan hal itu kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan maksimal dan hasil nya pun mampu berdampak positif bagi masyarakat maupun peningkatan investasi di daerah. Adapun tabel realisasi investasi di Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

Tabel 2.4
Realisasi Investasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024

No	Tujuan	Rincian	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Realisasi Investasi yang terdaftar OSS di Kabupaten Kebumen	Target Kinerja	Miliar Rupiah	392	397	401	405
		Realisasi	Miliar Rupiah	488,52	564,64	628,23	686,76

Sumber : DPMTPSP Kab.Kebumen 2024, Data Diolah

Dalam disimpulkan bahwa untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mampu mencapai target kinerja secara baik dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah investasi yang diperoleh adalah 388,52 miliar rupiah dan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2022 mampu mendapatkan investasi sebesar 564,64 miliar rupiah. Pada tahun 2023 sebesar 628,23 miliar rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya dan tahun 2024 sebesar 686,76 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Pencapaian kinerja secara maksimal tersebut didukung oleh beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi secara bertahap pada setiap kegiatanya, upaya yang dilakukan antara lain :

1. Mendorong ketersediaan lahan investasi (industri, perdagangan, jasa, dan properti) dengan luasan yang memadai pada lokasi yang strategis, didukung dengan ketersediaan infrastrutur penunjang dan aksesibilitas yang semakin baik.
2. Melaksanakan MOU (Memorandum of Understanding) antara pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dengan tenant pelayanan yang ada di MPP, seperti : Bank Jateng, Samsat, KPP Pratama, Disdukcapil, BP2MI, BPJS, Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Negeri, BPKPD, Disdik, Disnaker, Taspen, PLN, Disperkimhub, DPUPR, dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama.
3. Memperkuat kerja sama dalam melaksanakan kegiatan antara instansi horizontal maupun vertikal yang berkaitan dengan tupoksi DPMPTSP.
4. Memberikan layanan perizinan melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) ke masyarakat secara tepat dan cepat;
5. Mengintensifkan pengawasan penanaman modal kepada pelaku usaha.
6. Mempermudah proses perizinan melalui penggunaan system informasi OSS untuk pengurusan NIB dan system informasi perizinan Kabupaten Kebumen (Siperi);
7. Meningkatkan inovasi pelayanan, dengan melakukan layanan JEMPOL SATU (jemput bola satu pintu) yang langsung mendatangi pelaku usaha/pemohon izin.
8. Memberikan sosialisasi/informasi pelayanan Perizinan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media online (Instagram, website, dll);
9. Menindaklanjuti minat dari kelompok pelaku usaha melalui sosialisasi dan fasilitasi kemudahan berusaha;
10. Melakukan inovasi pada penanam modal/pelaku usaha dengan ikut serta dalam penyelenggaraan pameran, International Bussiness and Investment Forum (IBIF), dan memberikan penghargaan atas apresiasi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan ekonomi di Kabupaten Kebumen melalui Anugerah Usaha Terbaik (AUT), dengan tujuan meningkatkan spirit pelaku usaha dalam pelaksanaan usahanya.

Adapun beberapa koreksi pelaksanaan kegiatan maupun pada asministrasi nya dari hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) ynag dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKE AKIP) Tahun 2024 Nomor 700/IP.RB/ 19/4/2024 Tanggal 28 Juni 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen memperoleh nilai 76,65 termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik) walaupun nilai tersebut menurun

dari tahun 2023 dengan hasil 82,60 dengan kategorisasi “A”. Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorintasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/Subkoordinator, hasilnya sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dengan bobot (30) nilai 22,20
2. Pengukuran kinerja dengan bobot (30) nilai 23,40
3. Pelaporan kinerja dengan bobot (15) nilai 12,30
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, bobot (25) nilai 18,75

Telah memenuhi beberapa capaian kinerja seperti perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi, adapun beberapa rekomendasi atas kelemahan atau kekurangan dalam konsisi tersebut sehingga direkomendasikan oleh Inspektur Kebumen untuk melakukan perbaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscuting kinerja dengan tugas dan fungsi dari perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
2. Melakukan monitoring atas rencana kinerja secara berkala yang pelaksanaanya dapat berupa rapat koordinasi internal, rakor pop/k, maupun evaluasi per akhir bulan;
3. Menyempurnakan kualitas perencanaan kinerja dalam rencana kerja dengan menyajikan penjabaran/analisa atas perbaikan kinerja sebelumnya serta menyajikan informasi perbaikan/penyempurnaan untuk peningkatan kinerja;
4. Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP);
5. Menyempurnakan kualitasi laporan kinerja dengan menyajikan informasi atas capaian kinerja secara detail dengan menjabarkan proses perolehannya serta konteks/dampaknya terhadap masyarakat atau ibest practice/prestasi atas capaian kinerja;
6. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara mendalam mencakup analisis efisiensi sumber daya anggaran maupun efisiensi sumber daya manusia;

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan keuangan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 sejumlah Rp. 5.633.330.000,- dan diubah dalam perubahan anggaran DPA-Perubahan yaitu sebesar Rp. 5.988.458.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.855.488.249,- atau sebesar 81,08%. Analisa capaian kinerja program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kebumen disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.5

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan (Output)	Terget Kinerja Capain Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) s.d Triwulan II 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra Perangat Daerah s/d tahun berjalan	
								Terget Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK**								
2	**18**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**Meningkatnya Investasi**								
2	**18**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100.00**	**100 %**	**75 %**	**93,75**
2	18	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100.00	6 dokumen	7 Dokumen	156,25
2	18	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan	6 Bulan	110,42
2	18	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100.00	0	0	100,00
2	18	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercukupinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan	6 Bulan	104,17
2	18	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan	6 Bulan	110,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan (Output)	Terget Kinerja Capain Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) s.d Triwulan II 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra Perangat Daerah s/d tahun berjalan	
								Terget Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	18	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00	12 bulan	6 Bulan	100,00
2	18	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 unit	36 unit	36 unit	36 unit	100.00	36 unit	18 Unit	68,75
2	**18**	**2**		**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)**	**413 Miliar Rupiah**	**628 Miliar Rupiah**	**405 Miliar Rupiah**	**686,76 Miliar Rupiah**	**169,57**	**409 Miliar Rupiah**	**622,59 Miliar Rupiah**	**155,12**
2	18	2	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	0 Dokumen	125,00
2	18	2	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi Investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	1 Dokumen	87,50
2	**18**	**3**		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah**	**65 Dokumen**	**3 Dokumen**	**5 Dokumen**	**1 Dokumen**	**20.00**	**5 Dokumen**	**0 Dokumen**	**85,53**
2	18	3	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	5 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00	4 Kegiatan	1 Kegiatan	228,57
2	18	4		**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100**	**100 %**	**50 %**	**38,13**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan (Output)	Terget Kinerja Capain Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) s.d Triwulan II 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra Perangat Daerah s/d tahun berjalan	
								Terget Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	18	4	2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis layanan perizinan terintegrasi secara elektronik	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100	100 Dokumen	50 Dokumen	100,00
2	**18**	**5**		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku**	**382 Kegiatan Usaha**	**1481 Kegiatan Usaha**	**382 Kegiatan Usaha**	**2312 Kegiatan Usaha**	**605,23**	**382 Kegiatan Usaha**	**58 Kegiatan Usaha**	**94,65**
2	18	5	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	382 Kegiatan Usaha	1481 Kegiatan Usaha	382 Kegiatan Usaha	2312 Kegiatan Usaha	605,23	382 Kegiatan Usaha	58 Kegiatan Usaha	101,61
2	**18**	**6**		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase penyediaan layanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**50 %**	**270,00**
2	18	6	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumalh dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	1 Dokumen	130,00

Keterangan : Realisasi kinerja tahun 2025 merupakan data capaian kinerja sampai dengan triwulan II

Sumber Data : Simdalev Tahun 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 2.5 Capaian kinerja Renstra sampai dengan Tahun 2024 dapat dianalisis sebagai berikut:

2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan strategi daerah, dengan menggunakan indikator yang spesifik, jelas, dan terukur. Telah terlaksanakanya peningkatan kualitas sarana prasarana guna layanan perizinan dan nonperizinan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan yang tepat, cepat dan tranparan. Kebersihan yang selalu terjaga, dan dilakukan pengecekan secara berkala oleh petugas, serta mencukupi administrasi pemerintahan secara maksimal, selalu menerapkan kerjasama tim baik internal maupun eksternal instansi.

2.2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi pembuatan kajian potensi/peluang investasi maupun pemberian fasilitas insentif/kemudahan penanaman modal akan mendorong peningkatan jumlah investasi baru maupun memanfaatkan Central Java Investment Platform (CJIP) yang dikembangkan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan upload profil potensi/peluang investasi tersebut di aplikasi CJIP yang dapat diakses oleh publik secara luas.

Menganalisa dan menyediakan informasi kebutuhan calon investor/penanaman modal guna meningkatkan minat investasi dapat terealisasikan. Pendampingan pelak usaha yang memerlukan pendampingan minat investasi yang meningkat diperoleh dengan layanan fasilitasi dalam rangka memulai kegiatan berusaha di Kabupaten Kebumen. Fasilitasi yang diberikan adalah terkait dengan kemudahan informasi penanaman modal dikarenakan regulasi terkait pemberian insentif masih dalam proses penetapan. DPMPTSP memfasilitasi pelaku usaha dengan menyediakan opsi lahan yang statusnya *clean and clear*, memberikan layanan konsultasi terkait proses perizinan berusaha dan melaksanakan koordinasi dengan OPD teknis Maupin instansi terkait dengan ketersediaan jaringan listri, kebutuhan pasokan air, guna penunjang kegiatan usaha.

2.3. Program Promosi Penanaman Modal

Hal ini mendorong pencapaian indikator kinerja peningkatan jumlah investasi baru skala nasional karena dengan adanya kegiatan promosi akan menghasilkan Letter Of Intent (LOI) dari investor yang akan dilakukan proses lebih lanjut sehingga dapat terealisasi dan menambah jumlah investor baru yang berinvestasi di Kabupaten Kebumen. Untuk LOI pada tahun 2023 berhasil mendapatkan 4 LOI (Letter Of Intent) dengan total sekitar 160 miliar rupiah yang terdiri dari : PT

Sugeng Joyo Lautan Semesta, UMNU Kebumen, RS PKU Muhammadiyah Sruweng, dan Naura Amusement Park. Dan di tahun 2024 berhasil mendapatkan LOI sebanyak 1 dokumen.

Untuk pertumbuhan nilai investasi baik PMA maupun PMDN didukung oleh program pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang melputi berbagai macam kegiatan antara lain pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis, pendampingan pelaporan LKPM, fasilitasi penyelesaian masalah penanam modal, pemantauan dan pengawasan penanaman modal dimana semua kegiatan tersebut dapat mendorong para pelaku usaha untuk dapat mencatatkan realisasi investasinya. Pelaksanaan pelayanan perizinan yang diukur dengan indikator Nilai Investasi PMA/PMDN didukung oleh program pelayanan penanaman modal yang meliputi kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan, pemantauan pemenuhan komitmen maupun penanganan pengaduan yang seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan proses perizinannya.

2.4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan dan sebagai upaya mencapai good governance/ kepemerintahan yang baik.

Pelaksanaan kegiatan ini salah satunya dengan melakukan pengecekan lapangan di bidang perizinan terpadu bersama dengan tim teknis yang terdiri dari opd terkait sesuai bidang perizinannya masing-masing. Tujuan dari pengecekan lapangan ini untuk mengetahui/melakukan crosscheck komitmen (persyaratan) yang telah diunggah pada sistem perizinan yang telah sesuai dengan tata ruang teknis dan standar masingmasing yang tertera pada sistem berbasis online baik itu OSS, SimBG, MPP Digital maupun SIPERI.

2.5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Dengan diterbitkannya 3 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu Peraturan Badan Koordinasi

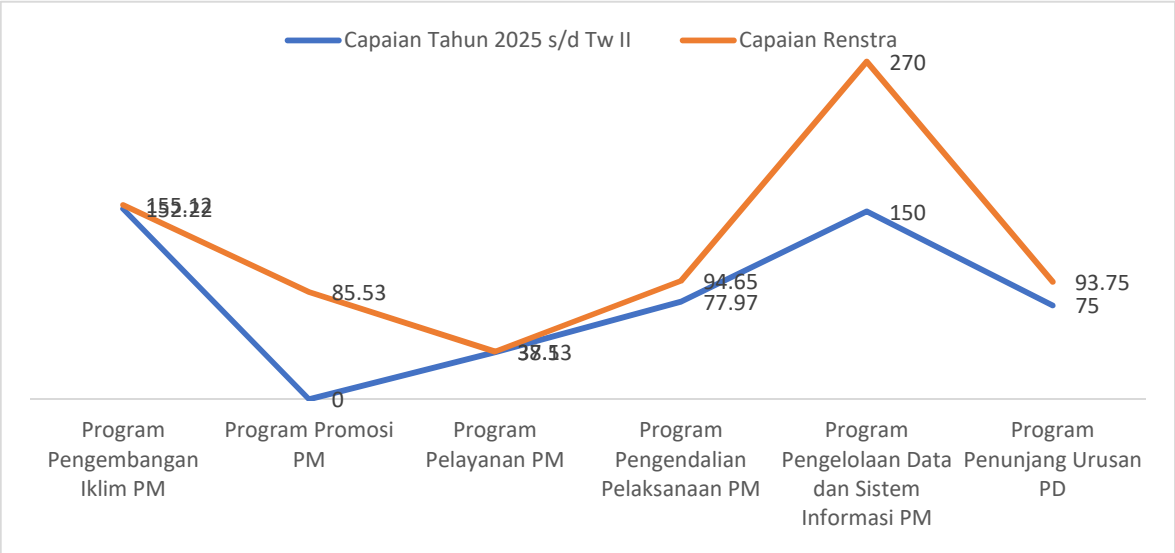
Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata cara Pedoman Perizinan Berusaha dan Fasilitas penanaman modal dan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, tugas fungsi pokok dari Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di seluruh DPMPTSP Provinsi, Kabupaten/Kota telah di jabarkan secara menyeluruh yaitu dengan 3 tugas dan fungsi pokok yakni pengawasan pelaku usaha, pembinaan pelaku usaha dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi.

Pembinaan pelaku usaha dan Fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan pemahaman para pelaku usaha maupun investor yang ingin berinvestasi di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Kebumen. Hal ini akan berdampak besar pada realisasi investasi dan tentu saja dapat meningkatkan roda perekonomian di daerah dan secara nasional. Peningkatan perekonomian dapat berupa terbukanya lapangan kerja, perputaran uang pada daerah dan penyerapan tenaga kerja yang lebih maksimal. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan pelaku usaha dan Fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses perizinan berusaha. Untuk melaksanakan tugas, fungsi pokok Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, maka dipandang perlu melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut secara bertahap dan semakin tahun semakin berkembang, dengan tidak dilakukannya hal yang sama setiap tahunnya.

2.6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Mendukung indikator Nilai Investasi PMA/PMDN melalui penyediaan fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dari sistem informasi maupun sarana pendukung jaringan internet, pemeliharaan sarana prasarana maupun helpdesk terkait penggunaan sistem maupun kendala dari sisi hardware maupun software. Pelaksanaan pelayanan perizinanan dapat dilakukan pengolahan data perizinan, publikasi data dan informasi agar dapat dimanfaatkan masyarakat serta mendukung indikator nilai Investasi

Grafik 2.1
Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Capaian Terhadap Renstra



Sumber : Simdalev DPMPTSP s/d Triwulan II, 2025 (Data diolah)

Capaian terhadap rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 untuk penjabaran per program kerja adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   Pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2025 ini terhadap target renstra dengan prosentase 155,12% atau tercapai sebanyak 2.500,58 Miliar rupiah dibandingkan target renstra sebesar 2.025 miliar rupiah. Dalam pencapaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 152.22 % terdahap target. Adapun program ini berhasil dalam mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.
2. Program Promosi Penanaman Modal
   Pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2025 ini terhadap target renstra dengan prosentase 85.53% atau tercapai sebanyak 130 dokumen kepeminatan dibandingkan target renstra sebesar 152 dokumen. Dalam pencapaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 0 % terdahap target. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan berada pada triwulan selanjutnya, Adapun program ini berhasil dalam mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
   Pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2025 ini terhadap target renstra dengan prosentase 165.50 % atau dibandingkan target renstra sebesar 100 persen. Dalam pencapaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 50,50 % terdahap target. Untuk

pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasar pada layanan langsung kepada masyarakat. Adapun program ini berhasil dalam mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

4. Program Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal
   Pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2025 ini terhadap target renstra dengan prosentase 94.65 % dibandingkan target renstra sebesar 100 persen. Dalam pencapaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 77,97 % terdahap target. Adapun program ini berhasil dalam mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.
5. Progam Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
   Pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2025 ini terhadap target renstra dengan prosentase 270 % atau dibandingkan target renstra sebesar 100 persen. Dalam pencapaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 150 % terdahap target, hal ini karenakan untuk laporan SKM telah dilaporkan berbentuk dokumen secara periodic triwulanan. Adapun program ini berhasil dalam mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Pencapaian sampai dengan triwulan II tahun 2025 ini terhadap target renstra dengan prosentase 93.75% atau dibandingkan target renstra sebesar 100 persen. Dalam pencapaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 75 % terdahap target, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasara penunjang layanan ditingkatkan guna menambah rasa kepercayaan masyarakat serta memberikan yang terbaik. Adapun program ini berhasil dalam mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

6. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen berikut, disajikan berdasarkan tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan investasi serta pelayanan publik dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dalam bentuk:

1. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya, waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan Layanan Perizinan.
2. Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
3. Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.
4. Mengkoordinir pengelolaan Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai jenis layanan publik di satu pintu mulai layanan perizinan, kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, perpajakan, BPJS, perbankan, keimigrasian, dan lain sebagainya.
5. Memberikan kemudahan perizinan terutama dengan adanya OSS, pelaku usaha lebih mudah untuk memulai usaha

khususnya UMKM, dan diberikan jaminan investasi mulai dari regulasi baik pusat maupun daerah penyediaan lahan hingga pendampingan pemenuhan izinnya.

6. Kabupaten Kebumen memiliki sumber daya yang potensial untuk mendukung pengembangan investasi daerah baik segi infrastruktur, geografis, tenaga kerja yang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran adalah sebagaimana tabel II.6 berikut :

Tabel II.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

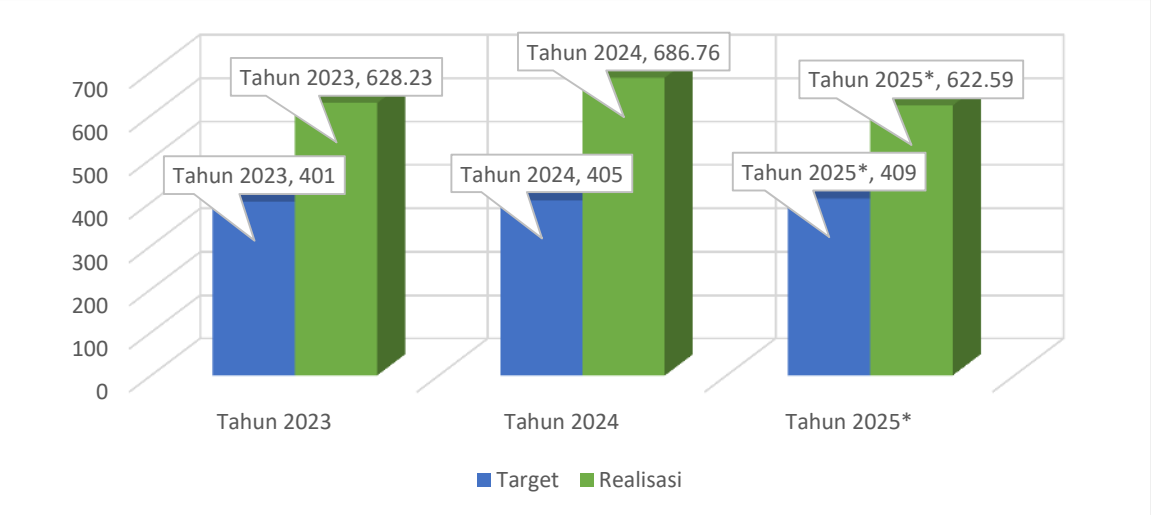
No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/ IKU (Tahun 2026)	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis (Formula Perhitungan)
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	-	Sasaran : Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	401 Miliar Rupiah	405 Miliar Rupiah	409 Miliar Rupiah	413 Miliar Rupiah	628 Miliar Rupiah	686 Miliar Rupiah	409 Miliar Rupiah	413 Miliar Rupiah	Dari PDRB pengeluaran ADHK pada komponen pembentukan Modal Tetap Bruto (Rumus Perhitungan dari BPS)
			IKU Urusan : Persentase Peningkatan Investasi	3,18 %	4,21 %	5,24 %	6,27 %	61,65%	76,70%	78%	80%	(Jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun (n) – jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun 2020) / jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun 2020 x 100% *) PMA dan PMDN

Sumber: LKJIP DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2024, Data Diolah

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dalam upaya pencapaian indikator sasaran yang diampu. Tujuan strategis adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas, dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah; dengan sasaran strategis adalah Pembentukan modal tetap bruto ADHK, dengan indikator kinerja urusan adalah persentase peningkatan investasi.

Capaian tujuan investasi pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 405 miliar rupiah dan mampu terealisasi sebesar 686,76 miliar rupiah dengan tingkat keberhasilan dalam mencapai target sebesar 169,57% dan persentase peningkatan investasi dari pada tahun sebelumnya 76,70%. Untuk tahun 2023 ditargetkan 401 miliar rupiah dengan realisasi 628 miliar rupiah, dengan persentase peningkatan investasi sebesar 61,65%. Hal ini didukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan sesuai dengan rencana apa yang telah ditetapkan serta inovasi dalam implementasi kegiatan dengan tujuan melayani masyarakat secara maksimal.

Grafik 2.2
Realisasi Investasi Tahun 2023-2025



Keterangan : Realisasi Investasi tahun 2025 s/d triwulan III

Sumber : LKjIP DPMPTSP Kab.Kebumen Tahun 2024

7. Permasalahan dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Permasalahan pokok yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 inklusif dan berdaya saing berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal, dengan permasalahan untuk urusan penanaman modal adalah ketidakpastian ekonomi global mengakibatkan berkurangnya jumlah penanaman modal dalam skala investasi kategori besar. Adapun permasalahan pada urusan Penanaman Modal adalah ketidakpastian ekonomi global mengakibatkan berkurangnya penanaman modal dalam skala investasi kategori besar.

Tema pembangunan pada tahun ini adalah penguatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Dengan strategi pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif dan aktraktif. Arah kebijakan dalam menjalankan strategi tersebut adalah :

1. Peningkatan keamanan dan stabilitas wilayah investasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan aparat keamanan;
2. Penyediaan keberlanjutan dan keandalan pasokan energi serta utilitas publik untuk mendukung operasional sektor industry, perdagangan, dan jasa;
3. Integrasi antara perencaan investasi dengan pembangunan kewilayahan.

Isu strategis sebagai konsep rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 terkait dengan isu strategis antara lain : perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, penurunan tingkat kemiskinan, dan tata kelola pemerintahan yang dinamis. Selain itu, Isu dinamika deopolitik dan geoekonomi global yang terus berkembang, mempengaruhi ekonomi serta ketahanan pangan di berbagai Negara, seperti ketergantungan bahan baku, fluktuasi harga, kebijakan dagang perlu upaya antisipasi untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Sesuai dengan isu nasional yang tercantum pada dokumen RPJMN 2025-2029, menjaga kestabilan ekonomi tersebut perlu dihadapi dengan menjaga sktabilan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemerintah daerah seperti peningkatan investasi, penguatan rantai pasok domestik, dan peningkatan nilai tambah produk lokal sebagai strategi utama ketahanan ekonomi.

Isu strategis yang selaras dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 terkait dengan urusan penanaman modal yaitu meningkatkan nilai

tambah dan daya saing produk lokal diperlukan strategis hilirisasi ekonomi yang berbasis pada pengolahan dan diverifikasi produk dari komoditas unggulan daerah. Diharapkan untuk pengembangan usaha pengolahan baik pengembangan produk turunan dari sektor pertanian maupun perkebunan yang tengah menjadi sektor prioritas dalam perekonomian nasional. Berdasarkan hasil analisis dalam kajian produk unggulan daerah maka pengembangan perekonomian daerah melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan menggunakan alat analisis Location Quotients (LQ), Shift Share maupun tipologi klassen dan dengan pemetaan melalui analisis overlay ketiganya, dan mengelaborasi melalui analisis Boston Consulting Group (BCG) Matrix dan Product Life Cycle (PLC) didapatkan delapan calon produk unggulan daerah Kabupaten Kebumen yaitu gula semut, industri kerajinan anyaman bambu, industri emping, pembibitan sapi PO, udang vaname, garam, pembibitan kelapa genjah entog kebumen.

Berdasarkan Peraturan daerah nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2039 dan berdasarkan hasil analisis maka industri unggulan di Kabupaten Kebumen yang digunakan sebagai dasar pengembangan industri selama kurun waktu 20 tahun ke depan (2019-2039) adalah fokus pada industri makanan; industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; industri tekstil; dan industri bahan galian bukan logam lainnya (genteng dan batu mulia). Adapun rencana pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Kebumen melalui Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM)

Program Unggulan :

Perencanaan dalam meng-implementasikan Program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu " Sregep Ngode Bareng Biyunge", dengan penjabaran sebagai berikut : program perluasan lapangan kerja minimal 5000 tenaga kerja melalui upaya mendekatkan investasi pada wilayah pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, memberikan akses tenaga kerja difabel, perempuan, dan masyarakat marjinal lainnya, dan fasilitasi pembiayaan calon pekerja migran.

Program unggulan ini selaras dengan 35 program delegasi Provinsi Jawa Tengah : Pembentukan kecamatan berdaya dengan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatifdan *sport center* dengan memanfaatkan asset pemerintah kabupaten/kota. Selain itu kebijakan pengembangan wilayah berdasarkan RTRW sesuai dengan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, wilayah pengembangan (WP) adalah pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki keterkaitan dari aspek fisik alam, sosial, ekonomi, dan budaya sebagai dasar koordinasi. Kabupaten termasuk dalam wilayah WP Keburejo bersama dengan Kabupaten Purworejo, dengan implementasi yaitu inisiasi rencana pembangunan kawasan industri Kebumen melalui kegiatan fasilitasi promosi investasi kawasan industri Kebumen, dan penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha; mendorong investasi yang mendukung potensi wilayah yang sejalan kebijakan geopark

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen diantaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan

Penanaman Modal dan investasi serta pelayanan publik Pembangunan sektor Penanaman Modal dan investasi serta pelayanan publik diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Identifikasi permasalahan daerah guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan maksimal, identifikasi perekonomian daerah terkait penanaman modal yaitu Belum optimalnya peningkatan perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya inovasi dan nilai tambah pada produk unggulan daerah, dan infrastruktur pendukung konektivitas antarwilayah yang masih perlu ditingkatkan untuk memperlancar perputaran ekonomi yang merata. Permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:

a) Potensi investasi Kabupaten Kebumen yang belum optimal dipromosikan kepada calon investor sehingga jumlah investor besar yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kebumen masih relatif sedikit. Selain itu, iklim investasi belum sepenuhnya kondusif karena dasar hukum pelaksanaan penanaman modal belum tersusun;
b) Belum adanya Perda Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Kabupaten Kebumen sehingga masih terjadi tumpah tindih antar sektor dalam penetapan prioritas sektor-sektor penanaman modal yang akan dipromosikan.
c) Belum optimalnya promosi investasi yang dapat menarik minat calon investor untuk berinvestasi secara nyata di Kab.Kebumen.

d) Masih adanya permasalahan penanaman modal yang membutuhkan koordinasi lintas sektor baik vertical maupun horizontal dan belum optimalnya pemanfaatan LKPM online oleh pelaku usaha.
e) Belum efektifnya peran tim teknis dalam proses pelayanan perizinan berusaha yang dilaksanakan, dalam mengatasi permasalahan ini maka harus dilakukan reposisi peran tim teknis dalam pelaynaan perizinan berusaha serta peningkatan efektifitas koordinasi antar tim teknis.
f) Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya), permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya antara lain :
    - Memastikan bahwa pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
    - Tersedianya media informasi pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan yang *applicable* dan *accessible* sesuai dengan perkembangan teknologi;
    - Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah, kompeten dan professional;
    - Tersedianya data potensi dan data eksisting perizinan berusaha dan nonperizinan yang *up to date*, valid dan terukur.
g) Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) belum mencakup keseluruhan pelaku usaha di Kab. Kebumen. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya penilaian perkembangan investasi riil di lapangan. LKPM berperan penting untuk menilai realisasi investasi Kab. Kebumen yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan investasi daerah yang lebih baik.

2. Isu-Isu Strategis

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Menciptakan inovasi baru dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan
2. Belum optimalnya penyediaan informasi potensi investasi di daerah yang praktis dan fleksibel, sehingga meningkatkan minat calon investor untuk menanamkan modalnya di daerah.
3. Masih rendahnya potensi usaha mikro kecil yang berkembang menjad usaha menengah/besar

4. Masih belum optimalnya investor yang merealisasikan modalnya dan sadar akan kewajiban melaporkan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Adapun rencana pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Kebumen melalui Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM).
6. Penyusunan regulasi yang pro investasi dan pelayanan perizinan berusaha di daerah.
7. Permasalahan jaminan kenyamanan dalam berinvestasi, hambatan ini lebih disebabkan oleh karena tidak terlaksananya secara maksimal SOP dalam proses pelayanan penanaman modal dan sumber daya untuk pelayanan penanaman modal yang kurang memadai baik berupa sarana/prasarana dan SDM penanaman modal.
8. Masih rendahnya tingkat inovasi dan capaian keberhasilan pelayanan penanaman modal yang meliputi aktivitas promosi investasi, perizinan investasi dan insentif penanaman modal di daerah.

8. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan program/kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan terdapat penyesuaian nomenklatur sub kegiatan berdasarkan SIPD RI, volume indikator keluaran dan lokasi untuk penyesuaian pagu anggaran usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD dan kebijakan kuota kecamatan.

Usulan program/kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Kebumen bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis), sedangkan usulan yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan, pokok-pokok pikiran anggota DPRD (politis), LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, dan usulan masyarakat melalui forum Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini belum ada usulan yang dapat diserap melalui forum tersebut. Adapun usulan program/kegiatan yang sesuai dengan hasil Forum Renja Tahun 2026 tercantum pada lampiran berita acara forum, dapat dilihat pada Tabel II.6 berikut .

Tabel II.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kebumen

Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal Renja PD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**5.064.421.547**					**5.064.421.547**	
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.064.421.547**					**5.064.421.547**	
i	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**5.064.421.547**					**5.064.421.547**	
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah Niali IKM Perangkat Daerah**	**76,73 Persen 90,27 Persen**	**4.670.677.547**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah Niali IKM Perangkat Daerah**	**76,73 Persen 90,27 Persen**	**4.670.677.547**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun**	**8 dokumen**	**18.700.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun**	**8 dokumen**	**18.700.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kebumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	13.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kebumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	13.000.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kebumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.700.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kebumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan	18	5.700.000	

No	Rancangan Awal Renja PD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**3.970.130.671**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 bulan**	**3.666.930.671**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kebumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.942.130.671	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kebumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.638.930.671	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Kebumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	28.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Kebumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	28.000.000	
3	**Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan diklat dan pelatihan pegawai**	**100 Persen**	**50.000.000**	**Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan diklat dan pelatihan pegawai**	**100 Persen**	**50.000.000**	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Kebumen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Kebumen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50.000.000	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 bulan**	**118.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**12 bulan**	**118.000.000**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1 Paket	20.000.000	

No	Rancangan Awal Renja PD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Kebumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Kebumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.500.000	
6	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Kebumen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kebumen	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kebumen	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000	
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Kebumen	Jumlah Dokumen Penatusahaan Arsip Dinamas pada SKPD	25 Dokumen	1.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Kebumen	Jumlah Dokumen Penatusahaan Arsip Dinamas pada SKPD	25 Dokumen	1.500.000	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Unit**	**30.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Unit**	**30.000.000**	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kebumen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kebumen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah bulan penyediaan jasa penujang urusan pemerintahan daerah**	**12 bulan**	**327.846.876**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah bulan penyediaan jasa penujang urusan pemerintahan daerah**	**12 bulan**	**631.046.876**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	

No	Rancangan Awal Renja PD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	200.846.876	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	200.846.876	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	125.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kebumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	428.200.000	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**44 Unit**	**156.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**44 Unit**	**156.000.000**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kebumen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	111.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kebumen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	111.000.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kebumen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	1.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kebumen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	1.500.000	
3	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Kebumen	Jumlah mebel yang dipelihara	10 Unit	26.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Kebumen	Jumlah mebel yang dipelihara	10 Unit	26.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kebumen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kebumen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.500.000	
B	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**		**Nilai Realisasi Penanaman Modal**	**418 Miliar Rupiah**	**45.000.000**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**		**Nilai Realisasi Penanaman Modal**	**418 Miliar Rupiah**	**45.000.000**	
8	**Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**		**Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di daerah**	**2 Dokumen**	**20.000.000**	**Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**		**Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di daerah**	**2 Dokumen**	**20.000.000**	

No	Rancangan Awal Renja PD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0 Dokumen	0	Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0 Dokumen	0	
2	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	20.000.000	
3	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko	1 Dokumen	0	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko	1 Dokumen	0	
9	**Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumen potensi investasi**	**1 Dokumen**	**25.000.000**	**Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumen potensi investasi**	**1 Dokumen**	**25.000.000**	
1	**Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota**	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	**Jumlah Peraturan Daerah (Perda) rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota**	**0 Dokumen**	**0**	**Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota**	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	**Jumlah Peraturan Daerah (Perda) rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota**	**0 Dokumen**	**0**	
2	**Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)**	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	**Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutkhiran data potensi investasi**	**0 Daerah**	**0**	**Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)**	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	**Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutkhiran data potensi investasi**	**0 Daerah**	**0**	
3	**Penyusunan peta potensi investasi Kabupaten/Kota**	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	**Jumlah dokumen peta potensi investasi Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**25.000.000**	**Penyusunan peta potensi investasi Kabupaten/Kota**	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	**Jumlah dokumen peta potensi investasi Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**25.000.000**	

No	Rancangan Awal Renja PD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
C	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		**Persentase peningkatan kepeminatan penanaman modal**	**18,18 Persen**	**178.044.000**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		**Persentase peningkatan kepeminatan penanaman modal**	**18,18 Persen**	**178.044.000**	
9	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan promosi penanaman modal**	**5 Kegiatan**	**178.044.000**	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan promosi penanaman modal**	**5 Kegiatan**	**178.044.000**	
1	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	178.044.000	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	178.044.000	
2	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	
D	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**Persentase pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan**	**92,5 Persen**	**100.700.000**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**Persentase pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan**	**92,5 Persen**	**100.700.000**	
10	**Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan perizinan berusaha melalui sistem terintegrasi berbasis elektronik**	**5000 Dokumen**	**100.700.000**	**Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan perizinan berusaha melalui sistem terintegrasi berbasis elektronik**	**5000 Dokumen**	**100.700.000**	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif Daerah	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	8.700.000	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif Daerah	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	8.700.000	
2	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	5000 Pelaku usaha	80.000.000	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	5000 Pelaku usaha	80.000.000	

No	Rancangan Awal Renja PD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	10 Kegiatan usaha	12.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	10 Kegiatan usaha	12.000.000	
E	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**Persentase jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku**	**100 Persen**	**58.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**Persentase jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku**	**100 Persen**	**58.000.000**	
11	**Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal**	**838 Kegiatan Usaha**	**58.000.000**	**Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal**	**838 Kegiatan Usaha**	**58.000.000**	
1	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	30 Kegiatan usaha	14.000.000	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	30 Kegiatan usaha	14.000.000	
2	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	40 Pelaku usaha	19.000.000	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	40 Pelaku usaha	19.000.000	
3	Pengawasan Penanaman Modal	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	50 Kegiatan usaha	25.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	50 Kegiatan usaha	25.000.000	

No	Rancangan Awal Renja PD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
F	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		**Persentase kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal yang dibutuhkan**	**100 Persen**	**12.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		**Persentase kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal yang dibutuhkan**	**100 Persen**	**12.000.000**	
12	**Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik**	**10 Dokumen**	**12.000.000**	**Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik**	**10 Dokumen**	**12.000.000**	
1	Pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah data dan infromasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan	10 Dokumen	12.000.000	Pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab.Kebumen, Semua Kel./Desa	Jumlah data dan infromasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan	10 Dokumen	12.000.000	

Sumber: DPMPTSP Kab.Kebumen Tahun 2025 (Data diolah)

9. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis), juga berasal dari usulan kegiatan program para pemangku kepentingan dalam hal ini Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (POKIR) dan usulan forum OPD (Partisipatif) yang masuk untuk Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

Pemilihan Prioritas program dan kegiatan pembangunan usulan masyarakat/lembaga telah disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Pemilihan prioritas kegiatan pembangunan usulan masyarakat/Lembaga tersebut dinilai mampu mendukung sasaran Persentase Peningkatan Investasi. Tidak adanya usulan yang didapatkan dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah Tahun 2026 yang dihadiri oleh perwakilan dari DPRD, Pelaku usaha, Akademisi, OPD terkait, Perwakilan lembaga terkait lainnya.

Gambar II.1
Daftar Usulan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026

LAPORAN HASIL FORUM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

FORM 8
DAFTAR USULAN KEGIATAN LINTAS OPD / LINTAS WILAYAH
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	NIHIL											

Kebumen, 19 Maret 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen

Muhamad Arifin, S.Si.,M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196807221999031001

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan delapan misi utama, dikenal sebagai Asta Cita, sebagai upaya pencapaian visi dan agenda prioritas pembangunan nasional, yang mencakup upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan berdaulat serta sebagai landasan untuk mencapai visi "Bersama Menuju Indonesia Emas 2045". Arah kebijakan untuk Bidang Urusan Penanaman Modal adalah **Pemenuhan Pencapaian target realisasi Penanaman Modal** dengan Asta Cita yaitu **melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.** Program kegiatan yang terintegrasi adalah Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan 2 subkegiatan yaitu pengawasan penanaman modal, dan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Sesuai dengan Visi RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan asta cita dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas nasional berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam perioder jangka menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Mengacu pada prioritas tersebut, Kabupaten Kebumen dapat menyusun program pembangunan yang terarah, berbasis kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Dalam mendukung prioritas pembangunan nasional, Kabupaten Kebumen berfokus pada penguatan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi sektor pertanian dan peternakan. Terkait misi peningkatan SDM, Kebumen memperkuat pendidikan berbasis komoditas unggulan untuk menjembatani kebutuhan industri. Pada program prioritas hilirisasi industri, kasawan Solo-Kebumen-Karanganyar-Sukoharjo menjadi koridor strategis pembangunan industry pengolahan, termasuk dalam pilar pembangunan regional, tetapi juga contributor nyata terhadap target pembangunan nasional.

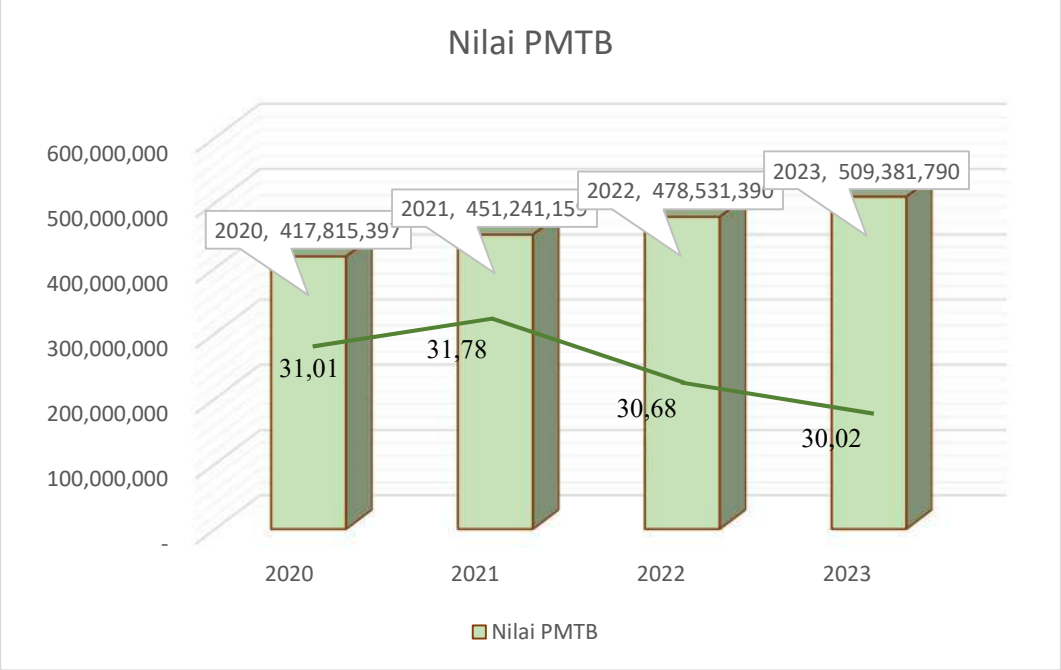
Adapun arahan RPJMN terhadap pembangunan wilayah Provinsi Jawa Tengah, beberapa hal yang menjadi intervensi pembangunan Kabupaten Kebumen antara lain pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian, peforma agrarian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; peningkatan manajemen usaha tani, penguatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem gudang; dan DPMPTSP berperan sebagai pemberi layanan bagi pemohon izin untuk pengembangan aktivitas usahanya baik demi memajukan perekonomian di daerah.

Upaya mendorong peningkatan investasi Jawa Tengah juga dilakukan berbagai regulasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Perda Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan penanaman modal yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Pergub Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur mengenai pemberian insentif dan kemudahan fiscal maupun non fiskal bagi investor. Terkait

penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha dan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Sejauh apa peran investasi pada perekonomian Jawa Tengah tercermin dari kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu berntuk berbagai jenis barang capital seperti bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya. Adapun pencapaian nilai kontribusi PMTB terhadap PDRB sebagai berikut :

Grafik 3.1
Nilai PMTB dan Kontribusi PMTB terhadap PDRB Jawa Tengah
Tahun 2020 – 2023



Sumber : RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Berdasarkan grafik 3.1 diatas menunjukan bahwa nilai PMTB pada periode tahun 2020-2023 mengalami peningkatan, tahun 2020 mencapai 417.815.397 menjadi 509.381.790 tahun 2023. Nilai PMTB didominasi sektor bangunan dengan rata-rata mencapai 85,12%. Namun demikian dari sisi kontribusi PMTB terhadap PDRB, terjadi tren penurunan pada tahun 2020 hingga tahun 2023 dan untuk kontribusi tahun 2020 sebesar 31,01; tahun 2021 sebesar 31,78; tahun 2022 sebesar 30,68; dan tahun 2023 sebesar 30,02

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang sedang dalam proses penyusunan. Visi Daerah Kabupaten Kebumen, sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2026 yaitu "***Kebumen Berdaya : Kebumen Beriman Maju Sejahtera Berbudaya***". Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif;
2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan Daerah;
3. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi; dan
5. Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026 yang telah disusun diselaraskan dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026

   Prioritas pembangunan Nasional pada Tahun 2025 diarahkan pada:

   a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
   b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
   c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
   d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
   e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
g. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba judi dan penyelundupan; serta
h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RKPD Tahun 2026 diarahkan pada tema Pembangunan Daerah Tahun 2026 yaitu Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional. Tahun 2026 ini juga diarahkan untuk "Penguatan Landasan Pembangunan Daerah" dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Penguatan landasan tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis;
2. Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan; serta
3. Penguatan landasan pembentukan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter.

3. Prioritas Pembangunan Kabupaten kebumen Tahun 2026

Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 bersumber dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 yang telah dirumuskan pada dokumen Rancangan Awal rencana panjang jangka menengah Kabupaten Kebumen yaitu "Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Pangan Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan;
3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan;
4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik; dan

5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan.

Dari 5 (lima) prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mendukung prioritas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Daerag melalui Sektor Pertanian dalam arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan, dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

a. Penyiapan tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match;
b. Pembinaan sektor informal utamanya PKL;
c. Peningkatan kewirausahaan melalui pelatihan dan inkubasi;
d. Peningkatan pemberdayaan UMKM agar UMKM mampu naik kelas;
e. Hilirisasi berbasis UMKM termasuk mendukung posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional terkait hilirisasi industri berbasis komoditas pertanian;
f. Peningkatan produktivitas pertanian serta pembangunan kawasan pertanian terpadu diantaranya dalam rangka mendukung posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional;
g. Peningkatan produktivitas kelautan dan perikanan;
h. Peningkatan daya saing perdagangan melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk lokal, memperluas jejaring pemasaran serta peningkatan konsumsi produk lokal;
i. Peningkatan promosi, even, paket wisata yang terintegratif, pengembangan ekonomi kreatif serta optimalisasi Geopark Kebumen melalui pengembangan geosite prioritas agar wisatawan lebih lama tinggal serta berbelanja di Kabupaten Kebumen; serta
j. Peningkatan realisasi investasi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026 telah selaras dengan prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun Nasional Tahun 2026. Selanjutnya dukungan program prioritas (termasuk target dan pagu indikatifnya) terhadap Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional Tahun 2026. Secara lengkap keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2026 tersaji pada Tabel III.1. sebagai berikut :

Tabel III.1.
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen
Tahun 2025 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2026

Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
Prioritas 1 Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	**Prioritas 3** Penguatan landasan pembentukan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter	**Prioritas 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas **Prioritas 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Prioritas 2 Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	**Prioritas 2** Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, berkelanjutan	**Prioritas 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru **Prioritas 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi **Prioritas 5** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri **Prioritas 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Prioritas 3 Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	**Prioritas 2** Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	**Prioritas 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Prioritas 4 Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	**Prioritas 1** Penguatan landasan tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis	**Prioritas 7** Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba judi dan penyelundupan
Prioritas 5 Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan	**Prioritas 1** Penguatan landasan tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis **Prioritas 3** Penguatan landasan pembentukan sumber daya manusia berdaya	**Prioritas 1** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia **Prioritas 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Sumber: RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sejumlah 5 prioritas secara keseluruhan prioritas tersebut selaras dengan 3 prioritas daerah Provinsi Jawa Tengah, dan 8 prioritas nasional pada RPJMN. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional sebesar 100% karena keseluruhan prioritas pembangunan daerah telah sesuai dan selaras dengan prioritas nasional.

Selain itu, dalam perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 perlu memperhatikan keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada draft dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen dengan Prioritas Nasional Tahun 2026. Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026 telah selaras dengan Sasaran RKPD Kabupaten Kebumen dengan indikator dan target pada Tahun 2026 serta Prioritas Daerah Tahun 2026 seperti pada tabel berikut:

Tabel. III.2

Keselarasan Sasaran RPJMD, Prioritas Daerah Kabupaten Kebumen dengan Prioritas Nasional Tahun 2026 pada DPMPTSP Kabupaten Kebumen

Sasaran		Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
1	Sasaran 2.2 Meningkatnya daya saing investasi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah (satuan: persen)	2,13	**Prioritas 2** Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan	**Prioritas 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru **Prioritas 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi **Prioritas 5** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan

Sasaran		Indikator Sasaran	Target Tahun 2026	Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
					industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam **Prioritas 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan negeri

Sumber Data: RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 (data diolah)

Adapun arah kebijakan Pemerintahan Provinsi dalam mendukung Asta Cita, pemerintah daerah diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh bidang urusan pemerintahan daerah ke dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Asta cita dan RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman dan harus selaras dengan prioritas nasional, penyusunan rencana kerja menjadi upaya kolektif untuk berdaulat, mandiri, berkepribadian, maju, dan berkeadlian. Adapun arah kebijakan terkait Urusan Penanaman Modal adalah "**Pemenuhan pencapaian target realisasi penanaman modal"** yang selaras dengan Asta Cita "**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri"**.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut didukung oleh Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Adapun beberapa upaya pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen diantaranya adalah:

1. **Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen**

   Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyebutkan bahwa inovasi daerah ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi dalam pelayanan publik merujuk pada pengembangan dan implementasi ide, proses, produk, atau layanan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi publik kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berkomitmen dan mendorong peningkatan inovasi pelayanan publik, dan beberapa inovasi pada DPMPTSP dalam mendukung sebagai berikut :

a. TARIYAN JEMPUT BOLA (Tiada Hari Tanpa Pelayanan – Jemput Bola Satu Pintu)

Pelayanan jemput bola merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pelaku usaha untuk mendapatkan NIB dengan memperpendek jarak serta memberikan pendampingan bagi pelaku usaha yang tidak bisa mendaftarkan usahanya secara online dan mandiri. Pelaksanaan jemput bola ini melalui undangan dari kelompok pelaku usaha/kecamatan/desa yang membutuhkan proses pendampingan guna mendapatkan nomor izin guna kegiatan usahanya yang belum tercatat dalam sistem berbasis online di Online Submittion Single (OSS), guna meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi di daerah. Upaya inovasi ini diperuntukan mempercepat jumlah pelaku usaha agar tercatat dalam sistem OSS dan meningkatkan pertumbuhan daerah, walaupun pelaku usaha dapat menginput sendiri pendaftaran kegiatan usahanya jika masih merasa terkendala bisa meminta untuk pendampingan guna upaya percepatan tersebut menghindari kesalahan dalam input kedalam sistemnya.

Dampak kongkret terhadap pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya jumlah perizinan berusaha dan nonperizinan yang terbit serta peningkatan nilai investasi setiap tahunnya. Bagi komunitas atau organisasi masyarakat yang menjalankan usaha yang akan membuat NIB juga menjadi lebih mudah dan cepat serta lebih efektif waktu karena lebih dekat secara geografisnya, hanya tinggal bersurat/undangan untuk mendapatkan layanan pendampingan. Untuk tahun 2022 jumlah perizinan terbit sebanyak 12.024 dan nilai investasi Rp. 564.646.202.367; pada tahun 2023 naik sebanyak 21.887 dan nilai investasi Rp. 628.230.300.587; dan pada tahun 2024 izin naik menjadi 25.150 dan nilai investasi sebanyak Rp. 686.760.779.257.

b. SIPERI (Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi)

Sebelum adanya siperi ini, pelayanan perizinan masih ditindaklanjuti secara manual dengan proses perizinan dengan waktu yang lama, formulir perizinan masih berbentuk cetak dan banyak jenisnya. Pelayanan perizinan masih sangat rawan dengan adanya “pungutan” tidak resmi, prosedur penerbitan izin yang belum sepenuhnya memenuhi standar. Demi kepengurusan izin usahanya, perlu waktu yang lumayan lama dikarenakan bolak-balik untuk melengkapi persyaratan,

dokumen sebagai kelengkapan persyaratan menumpuk, dan tidak sesuai dengan standar operasional. Oleh karena itu maka diperkenalkan sistem perizinan yang terintegrasi, yang memberikan pelayanan pada masyarakat dan tenaga kesehatan dalam mendapatkan perizinan, seperti izin prakterk, izin penggunaan alun-alun, izin reklame, dan PKKPR Non berusaha dan lain-lain.

Siperi terdiri dari 46 layanan perizinan dan nonperizinan yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa batasan tempat dan waktu, dengan syarat mempunyai perangkat PC/Laptop/HP yang terhubung pada jaringan internet. Masyarakat yang akan memproses perizinannya hanya perlu membuat akun dan melengkapi seluruh persyaratan sesuai dengan SP dan SOP, untuk kemudian diverifikasi oleh petugas perizinan yang berwenang serta izin terbit.

Guna meminimalisir tindak pungutan liar yang juga berdampak pada proses perizinan yang dilakukan melalui Siperi, proses perizinan dapat dolakukan tracking/pengecekan tahap prosesnya dan perbaikan berkas oleh pemohon setelah adanya penolakan berkas yang diajukan yang membuat pelaku usaha dapat lebih cepat dalam memperbaiki dan petugas layanan, tim teknis, lebih cepat dalam upaya tindaklanjut perbaikan tersebut. Dampak positif adanya siperi ini adalah kenikan pada jumlah perizinan yang terbit dan memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan lebih efektif efisien. Jumlah perizinan terbit tahun 2022 adalah 725; tahun 2022 sebanyak 2.898; tahun 2023 sebanyak 2.293; dan tahun 2024 sebanyak 2.141. Adapun penurunan jumlah izin terbit pada tahun 2024, hal ini dikarenakan adanya kebijakan pendelegasian kewenangan yang telah diimplementasikan kepada sistem MPP Digital untuk izin tenaga kesehatan dan tenaga medis.

c. MPP (Mal Pelayanan Publik)

Dengan adanya inovasi pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di suatu daerah, memberikan dampak langsung terhadap berjalananya proses pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Penyelenggaraan tempat guna pelayanan publik satu pintu dengan adanya Mal Pelayanan Publik guna mempermudah memberikan layanan kepada masyarakat agar layanan terpusat pada MPP dengan berbagai petugas langsung dari masing-masing kantor/instansi/BUMN yang telah bekerjasama. Adapun beberapa loket layanan yang telah bisa membuka stand antara

lain : Samsat, Bank Jateng, BPOM, BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan, Disdik, Disdukcapil, Bappenda, KPP Pratama, Pengadilan Agama, Kejaksaan negeri, Pengadilan Negeri, Taspen, PLN, Disnaker, Kantor Imigrasi I Cilacap, PDAM, Kemenag, dan BP2MI. Untuk kedepannya akan berusaha meningkatkan kerjasama dengan instansi guna memberikan kemudahan pada masyarakat, yang harus didukung dari segi petugas layanan, SOP, Anggaran kegiatan guna mempersiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan guna penambahan loket layanan tersebut.

Pengenalan adanya Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kebumen mulai digencarkan melalui rangkaian kegiatan instansi dan keaktifan menyebarluaskan informasi kegiatan melalui sosial media resmi dari DPMPTSP Kabupaten Kebumen. Untuk pengguna layanan tahun 2022 sebanyak 57.214 pengguna layanan; tahun 2023 sebanyak 80.256 pengguna layanan; dan tahun 2024 sebanyak 74.813 pengguna layanan. Memberikan dampak langsung pada masyarakat dibuktikan dengan telah mendapatkannya penghargaan dari Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) pada tahun 2024 sebagai pelayanan publik kategori prima, dan penghargaan lainnya terkait dengan pelayanan publik.

Memberikan sarana prasarana yang diperuntukkan untuk kelompok rentan, seperti : guilding block, toilet khusus difabel, alat bantu dengar, parkir disabilitas, laktasi, tempat tunggu prioritas, kursi roda, dan fasilitas pendukung lansia serta disabilitas yang berusaha terus ditingkatkan guna memenuhi standar pelayanan yang baik. MPP Kabupaten Kebumen telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi berdasarkan Keputusan Menpan-RB Nomor 1034 Tahun 2022 Tentang Unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Peningkatan kualitas pelayanan selalu ditingkatkan dengan selalu terjaga nya kebersihan pengguna layanan, memberikan sarana prasarana yang memadai semaksimal mungkin, dan memberikan layanan dengan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam Renja Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yaitu : "*Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman-Maju-Sejahtera-Berbudaya".* Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

Misi 1 : Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasa yang Berkeadilan dan Inklusif

Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan Daerah

Misi 3 : Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan

Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayem

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal

Dari penjabaran visi dan misi tersebut di atas peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen adalah mendukung dan menyukseskan misi ke-2 (dua). Dalam mewujudkan visi, pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung kesuksesan pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tujuan Kinerja Strategis DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2026 yaitu "**Meningkatkan peranan investasi terhadap perekonomian daerah**", dalam mencapai tujuan tersebut didukung sasaran yaitu : meningkatnya investasi. Tujuan dan sasaran Kinerja Strategus DPMPTSP Kabupaten Kebumen, memiliki indikator dengan target capaian yang telah ditentukan, sebagai tolok ukur capaian kinerja Tahun 2026, target tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel III.5 berikut ini.

Tabel III.3.
Tujuan dan Sasaran Kinerja Strategis
DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2026

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
Tujuan : **Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah**	**Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHK**	Miliar Rupiah	413
Sasaran : Meningkatnya investasi	Persentase peningkatan investasi	%	6.27

Sumber : RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026,(Data diolah)

Adapun strategi yang telah ditetapkan bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP pada setiap lima periode tahun anggarannya. Dalam penyusunan tahun tahap kedua atau tahun 2026 ini strategi yang ditetapkan adalah penguatan pada ekosistem investasi dengan pelaksanaan, antara lain pemberian insentif & kemudahan penanaman modal; pengembangan sistem layanan perizinan terintegrasi; dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Untuk tahun periode ini lebih memprioritaskan pada layanan perizinan terintegrasi yang langsung berdampak kepada masyarakat, sehingga akan dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang telah dijalankan baik secara langsung maupun melalui sistem terintegrasi online.

Beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut diatas antara lain :

1. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, terutama bagi investor yang menyerap banyak tenaga kerja lokal dengan standar kompetensi tertentu,
2. Menyusun peta potensi investasi daerah berbasis keunggulan kompetitif dan komparatif,
3. Optimalisasi pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri (KPI),
4. Mendorong investasi di kawasan UNESCO Global Geopark Kebumen dengan memberikan fasilitasi sinergi antara BUMD/BUMN, UMK, dan investor besar dalam rantai pasok daerah,
5. Penerapan *Investment Aftercare Service* untuk menjaga keberlanjutan investasi yang telah masuk, dan monitoring realisasi berbasis dashboard digital (OSS RBA).

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam memastikan tujuan dan sasaran urusan pemerintahan daerah yang tersinkronisasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diperlukan program kegiatan guna memenuhi layanan satuan kerja perangkat daerah tersebut. Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten. Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 pada DPMPTSP Kabupaten Kebumen, dijabarkan dalam 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah, 5 (empat) program urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan melaksanakan kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ada 5 (empat) program. Program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pangan yang akan dilaksanakan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang terdiri dari kegiatan:
   a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dengan indikator kinerja jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di daerah.
   b. Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja jumlah dokumen potensi investasi.
2. Program Promosi Penanaman Modal, yang terdiri dari kegiatan:
   a. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja dokumen kepeminatan penanaman modal kabupaten/kota.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal, yang terdiri dari kegiatan:
   a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan perizinan berusaha melalui system terintegrasi berbasis elektronik.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, yang terdiri dari kegiatan:
    a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, yang terdiri dari kegiatan:
    a. Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.

Adapun perincian atas rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dan tertuang dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel III.4
Rincian Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2026

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					5.064.421.547
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1. Nilai SAKIP perangkat daerah; 2. Nilai IKM perangkat daerah	1. 70,73 % 2. 90,27 %	4.670.677.547
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	8 Dokumen	18.700.000
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	3.970.130.671
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat dan pelatihan pegawai	100 Persen	50.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	118.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerag Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Junlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Unit	30.000.000

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Penyedaiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	327. 846.876
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	44 Unit	156.000.000
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Nilai realisasi penanaman modal	418 Miliar Rupiah	45.000.000
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di daerah	2 Dokumen	20.000.000
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi investasi	1 Dokumen	25.000.000
3	Program Promosi Penanaman Modal		Persentase peningkatan kepeminatan penanaman modal	18,18 Persen	178.044.000
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen kepeminatan penanaman modal kabupaten/kota	13 Dokumen	178.044.000

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
4	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan	92,5 Persen	100.700.000
		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan perizinan berusaha melalui sistem terintegrasi berbasis elektronik	5000 Dokumen	100.700.000
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	100 Persen	58.000.000
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	838 Kegiatan Usaha	58.000.000
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Persentase kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal yang dibutuhkan	100 Persen	12.000.000

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
7		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Derah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	10 Dokumen	12.000.000
				Jumlah	**5.064.421.547**

Sumber : RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026

Pagu anggaran untuk tahun 2026 adalah 5.064.421.547 yang didukung oleh 6 program, dan 13 kegiatan guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran kinerja instansi. Program utama pendukung IKU adalah program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, program pelayanan penanaman modal, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Pendukung program utama tersebut ada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Untuk target kinerja tahun 2026 adalah capaian investasi PMA/PMDN sebesar 418 miliar rupiah, dengan aktivitas kegiatan menyediakan peta informasi terkait potensi investasi di Kabupaten Kebumen dan mempromosikan potensi tersebut dengan cara ikut serta dalam event pameran ataupun melalui media sosial agar terjaring investasi yang memajukan perekonomian daerah.

Pendayagunaan ekonomi daerah dilakukan dengan melaksanakan layanan perizinan dan nonperizinan demi pelaku usaha agar terdaftar pada sistem berbasis online, sehingga dapat memberikan input data yang rill terkait dengan kegiatan usahanya. Telaksananya pengawasan penanaman modal atau aktivitas inspeksi lapangan bertujuan memastikan pelaku usaha dalam melakukan input data yang sesuai keadaan rill nya, dan memberikan pendampingan dalam proses penginputan kedalam sistemnya. Melakukan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, selain itu juga memberikan layanan publik yang berprioritas pada kenyamanan masyarakat.

Pada tahun 2025 ini telah terlaksana koordinasi secara lebih intens bersama dengan OPD tim teknis perizinan dan nonperizinan, demi mewujudkan layanan yang sesuai dengan standar pelayanan serta harapan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan mudah dalam pelaksanaanya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah dokumen Rancangan Akhir Renja DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2026. Renja ini disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2026. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis DPMPTSP Kabupaten Kebumen. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi serta kebijakan yang telah ditentukan dalam cascading DPMPTSP Kabupaten Kebumen untuk pencapaian tujuan tahun rencana strategis, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai indikator kinerjanya untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2026 dan perkiraan tahun 2027, maka ditetapkan anggaran untuk pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan DPMPTSP Kabupaten Kebumen berdasarkan indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabatkan dalam pencapaian rencana strategis DPMPTSP berdasarkan pagu indikatif.

Adapun rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen untuk tahun anggaran 2026 yang berasal dari dana APBD Murni dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai berikut tertuang dalam tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan DPMPTSP Kabupaten Kebumen
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatir	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.18			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								
2.18	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah (Dengan Satuan : Persen)**		**76,73 %**	**4.670.677.547**			**76,77 %**	**4.816.069.824**
				Nilai IKM perangkat daerah (Dengan Satuan : Persen)		**90,27 %**				**90,32 %**	
2.18	01	2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun (Dengan Satuan : Dokumen)		8 Dokumen	18.700.000			8 Dokumen	19.900.000
2.18	01	2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	umlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	4 Dokumen	13.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Dokumen	13.800.000
2.18	01	2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Laporan)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	4 Laporan	5.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Laporan	6.100.000
2.18	01	2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan : Bulan)		12 Bulan	3.970.130.671			12 Bulan	4.095.604.347
2.18	01	2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan : Orang/bulan)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	28 Orang/Bulan	3.942.130.671	Dana Alokasi Umum (DAU)		28 Orang/Bulan	4.067.004.347
2.18	01	2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Juumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan : Dokumen)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	12 Dokumen	28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Bulan	28.600.000

Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatir	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.18	01	2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhankebutuhan diklat dan pelatihan pegawai (Dengan Satuan:Persen)		100 %	50.000.000			100 %	51.000.000
2.18	01	2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan : Orang)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	50 Orang	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		50 Orang	51.000.000
2.18	01	2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah bulan Penyediaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan : Bulan)		12 Bulan	118.000.000			12 Bulan	123.400.000
2.18	01	2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	1 Paket	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Paket	20.700.000
2.18	01	2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	1 Paket	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Paket	20.700.000
2.18	01	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	1 Paket	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Paket	20.700.000
2.18	01	2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	2 Dokumen	1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	1.800.000
2.18	01	2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	1 Paket	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Paket	20.700.000
2.18	01	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan : Laporan)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	12 Laporan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	37.000.000
2.18	01	2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan : Dokumen)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	25 Dokumen	1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		25 Dokumen	1.800.000
2.18	01	2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan : Unit)		2 Unit	30.000.000			2 Unit	36.500.000

Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatir	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.18	01	2.07.0001	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	2 Unit	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Unit	36.500.000
2.18	01	2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan : Bulan)		12 Bulan	327.846.876			12 Bulan	331.365.478
2.18	01	2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan : Laporan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	1 Laporan	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	2.050.000
2.18	01	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan : Laporan)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	1 Laporan	200.846.876	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	203.815.478
2.18	01	2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Laporan)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	1 Laporan	125.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	125.500.000
2.18	01	2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan : Unit)		44 Unit	156.000.000			44 Unit	158.300.000
2.18	01	2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan : Unit)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	20 Unit	111.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		20 Unit	112.500.000
2.18	01	2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan : Unit)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	13 Unit	1.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		13 Unit	1.700.000
2.18	01	2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan : Unit)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	10 Unit	26.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		10 Unit	26.300.000
2.18	01	2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan : Unit)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	1 Unit	17.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	17.800.000

Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatir	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.18	03	2.01	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi PMA/PMDN (Dengan Satuan : Miliar Rupiah)		418 Miliar rupiah	45.000.000			418 Miliar rupiah	45.700.000
2.18	03	2.01	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di daerah (Dengan Satuan : Dokumen)		2 Dokumen	20.000.000			2 Dokumen	20.300.000
2.18	03	2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	2 Dokumen	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	20.300.000
2.18	03	2.02	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen potensi investasi (Dengan Satuan : Dokumen)		1 Dokumen	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	25.400.000
2.18	03	2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota (Dengan Satuan : Dokumen)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	1 Dokumen	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	25.400.000
2.18	03	2.01	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan kepeminatan penanaman modal (Dengan Satuan : Persen)		18,18 %	178.044.000			23,08 %	179.500.000
2.18	03	2.01	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen kepeminatan penanaman modal kabupaten/ kota (Dengan Satuan : Dokumen)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	13 Dokumen	178.044.000			16 Dokumen	179.500.000
2.18	03	2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota (Dengan Satuan : Dokumen)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	2 Dokumen	178.044.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Dokumen	179.500.000
2.18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan (Dengan Satuan : Persen)		92,5 %	100.700.000			92,5 %	101.700.000
2.18	04	2.01	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan perizinan berusaha melalui sistem terintegrasi berbasis elektronik (Dengan Satuan : Dokumen)		5.000 Dokumen	100.700.000			5.000 Dokumen	101.700.000
2.18	04	2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	15 Dokumen	8.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		15 Dokumen	8.900.000

Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatir	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan : Dokumen)							
2.18	04	2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Dengan Satuan : Pelaku Usaha)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	5.000 Dokumen	80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		5.000 Dokumen	80.500.000
2.18	04	2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Dengan Satuan : Kegiatan Usaha)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	10 Kegiatan Usaha	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		10 Kegiatan Usaha	12.300.000
2.18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku (Dengan Satuan : Persen)		100 %	58.000.000			100 %	59.100.000
2.18	05	2.01	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah kegiatan pengendalian Pelaksanaan penanaman modal (Dengan Satuan : Kegiatan Usaha)		838 Kegiatan Usaha	58.000.000			880 Kegiatan Usaha	59.100.000
2.18	05	2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Dengan Satuan : Kegiatan Usaha)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	30 Kegiatan Usaha	14.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		30 Kegiatan Usaha	14.200.000
2.18	05	2.01.0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Dengan Satuan : Pelaku Usaha)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	40 Pelaku Usaha	19.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		40 Pelaku Usaha	19.500.000

Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatir	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.18	05	2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan, serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Dengan Satuan : Kegiatan Usaha)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	50 Kegiatan Usaha	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		55 Kegiatan Usaha	25.400.000
2.18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal yang dibutuhkan (Dengan Satuan : Persen)		100 %	12.000.000			100 %	12.200.000
2.18	06	2.01	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik (Dengan Satuan : Dokumen)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	10 Dokumen	12.000.000			10 Dokumen	12.200.000
2.18	06	2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dengan Satuan : Dokumen)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.	10 Dokumen	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		10 Dokumen	12.200.000
Total							5.064.421.547				5.214.269.824

Sumber Data: Aplikasi Corona Consulting DPMPTSP Tahun 2026 (Data diolah)

Untuk mewujudkan tujuan yaitu meningkatkan nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi daerah dengan indikator kinerja adalah pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK dengan target sebesar 19,16% tahun 2026, dan 19,28% pada tahun 2027; serta sasaran yaitu meningkatnya penanaman modal dengan indikator kinerja persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota dengan target kinerja pada tahun 2026 adalah 9,75% dan tahun 2027 sebesar 10,00%. Adapun DPMPTSP Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran sebesar Rp.5.064.421.547,- pada tahun 2026 berdasarakan penyesuaian program kegiatan yang telah terencana, dan pada tahun 2027 sebesar Rp.5.214.269.825,- yang terdiri dari 6 program, 13 kegiatan, dan 30 subkegiatan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen Tahun 2026 ini disusun dengan merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah untuk Kebupaten Kebumen. Dalam rangka operasional rencana kerja ini dalam mencapai tujuan dan sasarannya maka DPMPTSP mengambil langkah-langkah konkrit guna implementasikannya, serta mewujudkan kinerja program dan kegiatan yang ada secara efektif, efisien, serta tepat tujuan, dan tepat sasaran.

5.1 Catatan Pelaksanaan Kinerja

Penyusunan rencana kerja ini mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, progam dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja perangkat daerah dalam prioritas pembangunan visi dan misi daerah untuk menhada konsistensi antara perencanaan dan pengganggaran dalam menunjang peningkatan kinerja daerah. Adapun beberapa catatan penting dalam pelaksanaan kinerja yang diharapkan berjalan sebagaimana mestinya sebagai berikut :

a. Visi “Kebumen Berdaya: *Kebumen Beriman Maju Sejahtera dan Berbudaya”* , dan Misi kedua “Peninkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan berkelanjutan. Tujuan DPMPTSP Kabupaten Kebumen yaitu Meningkatkan nilai tambah baru yang di investasikan dalam pembangunan ekonomi daerah dengan indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB); dan sasaran yaitu meningkatnya penanaman modal dengan indikator peningkatan investasi di kabupaten/kota.
b. Program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diimplementasikan “Sregep Ngode Bareng Biyunge”, dengan penjabaran sebagai berikut : program perluasan lapangan kerja

minimal 5000 tenaga kerja melalui upaya mendekatkan investasi pada wilayah pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, memberikan akses tenaga kerja difabel, perempuan, dan masyarakat marjinal lainnya, dan fasilitasi pembiayaan calon pekerja migran.

c. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2026, DPMPTSP Kabupaten Kebumen didukung oleh 6 program kerja, dan 12 kegiatan yang akan mendukung dalam pencapaian kinerja tepatnya pada urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan khususnya pembangunan di bidang penanaman modal tergantung dari peran aktif, semangat, daya juang, sikap mental, tekad serta ketaatan dan disiplin dari semua unsur yang terkait dengan bidang penanaman modal yang ada di daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kebumen berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran program-program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2026 secara sinergis dan terintegrasi;
2. Pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2026 diarahkan untuk Penenuhan Infrastuktur dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas pada urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, guna Percepatan Penangggulangan Kemiskinan yang didukung dengan adanya pelaksanaan kegiatan guna mendorong pengentasan kemiskinan ataupun pengangguran dalam sektor-sektor yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok fungsinya*;*
3. Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026 yang telah tertuang pada dokumen rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen menjadi dasar seluruh aktivitas yang akan terlaksana pada tahun periode tersebut, hal ini dalam rangka sinkronisasi dan integrasi

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), serta sumber-sumber lainnya yang sah. Proses ini mengedepankan penyaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha melalui forum perangkat daerah, konsultasi publik, dengar pendapat publik (*public hearing*) atau forum lintas pelaku sesuai kebutuhan perangkat daerah masing-masing;

4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan perencanaan program, setiap perangkat daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pada akhir tahun anggaran 2026, setiap perangkat daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan peraturan-peraturan lainnya.
6. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam hal:
    a. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah difasilitasi melalui Forum Rencana strategis dan Perangkat Daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan melalui beberapa tahap, yakni dari di tingkat desa dan kecamatan, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi secara baik;
    b. Pelaksanaan program-program berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya renja tahun 2026, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026. Diharapkan dokumen renja ini dapat mempercepat proses pencapaian visi dan misi pembangunan di bidang urusan penanaman modal dan urusan bidang pelayanan terpadu satu pintu dalam mewujudkan kinerja yang berkualitas, maju, transparan, dan berperan penting dalam pembangunan daerah.

Dengan ditetapkannya renja ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkup DPMPTSP Kabupaten Kebumen terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Dokumen ini dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada tahun periode yang sama.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2026, seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya.

Melalui penyusunan rencana kerja DPMTPSP Kabupaten Kebumen tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan daerah yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi Pemerintah Daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergi serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kebumen maupun dengan perangkat daerah lingkup luat yang membidangi fungsi tertentu.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Kebumen, tanpa adanya kerja sama yang harmonis maka pencapaian tidak akan berjalan dengan optimal. Untuk selanjutnya apabila dalam

pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Kebumen tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian pada perubahan renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diharapkan dengan tersusunnya rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2026 ini, dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kegiatan dan program pembangunan dan dapat dihindari adanya kegiatan dan program yang keluar dari kesepakatan dalam dokumen renja ini. Demikian penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2026, kami mohon masukan dari semua pihak agar dokumen iini bisa menjadi lebih bermanfaat dan berguna kedepannya.

Kebumen, 30 Juli 2025
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen



[redacted] ERNAWAN,S.T,M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197007231998031006

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Krima karmila, S.Sos. M.Eng	
Dyah Mustikarini. ST. MLij	

LAMPIRAN- LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Indrakila No. 10 Kebumen Kode Pos 54311 Telp./Fax.(0287)385912, 385925
Laman : www.dpmptsp.kebumenkab.go.id
Pos-el : dpmptspkabkebumen@yahoo.com

Kebumen, 17 Juli 2025

Yth. Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan Setda
Kabupaten Kebumen
di
Kebumen

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2 / 1825.

No.	Naskah Dinas / Barang yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Pengiriman Laporan Rakor POP/K Triwulan II TA. 2025 pada DPMPTP Kabupaten Kebumen	1 Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa.

Diterima tanggal .....

Penerima

Tuginem

a.n. Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
Sekretaris DPMPTSP,

Puji Rahayu, S.E.
Penata Tk.I - III/d
NIP. 19700604 199301 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Indrakila No. 10 Kebumen Telp. (0287) 385912, 385925, Fax (0287) 385925
E-Mail: dpmptspkabkebumen@yahoo.com, Website: www.dpmptsp.kebumenkab.go.id
KODE POS 54311

LAPORAN RAKOR POP/K TRIWULAN II
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Bupati Kebumen Nomor Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu melaksanakan Rakor POP/K Triwulan II Tahun Anggaran 2025 sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan.

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 400.3.3.6/1427/2025 Tentang Rakor pop tahap II tahun anggaran 2025;
5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 000.5.2.7/1924/2025 Tentang Entri data proyeksi realisasi keuangan sampai dengan Juni 2025;

6. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Untuk melaksanakan pengendalian pembangunan/kegiatan secara umum serta untuk membantu penyelenggaraan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat terlaksana berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dan disepakati.

2. Tujuan

   Memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan serta mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di setiap program dan kegiatan.

II. PENYELENGGARAAN

Pelaksanaan Rakor POP/K Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	:	Rabu, 16 Juli 2025.
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB s.d Selesai.
Acara	:	Rapat Rakor POP/K Triwulan II TA. 2025.
Tempat	:	Ruang Rapat Biru DPMPTSP Kabupaten Kebumen.
Pimpinan Rapat	:	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Kebumen.
Peserta Rapat	:	1. Bagian Administrasi Pembangunan Setda (Mas Agung); 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Pejabat Struktural; 4. Pejabat Fungsional; 5. Bendahara; dan 6. Pengelola Keuangan DPMPTSP.

III. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pembukaan oleh Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Kebumen
2. Pemaparan Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 oleh Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Kebumen.

3. Tanggapan/Saran/Masukan oleh Masing-masing pelaksana kegiatan.
4. Pembahasan rencana kegiatan dan upaya evaluasi pelaksanaan kegiatan.
5. Kesimpulan

IV. HASIL YANG DICAPAI

1. Sekretaris DPMPTSP menyampaikan:
   a. Misi yang diampu adalah misi kedua yaitu Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan berkelanjutan.
   b. Tujuan adalah meningkatkan perekonomian yang berbasis potensi lokal, dengan indikator persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatkan perekonomian sektor primer dengan indikator adalah jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA).
   c. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari tahun awal Rencana Strategis (Renstra) berhasil melampaui target, dan progress pencapaian indikator sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi
2020	382.000.000.000	388.644.285.520
2021	392.000.000.000	488.529.005.110
2022	397.000.000.000	564.646.202.367
2023	401.000.000.000	628.230.300.587
2024	405.000.000.000	577.545.160.426
2025 (Tw II)	409.000.000.000	269.500.880.753

   d. Proyek yang telah berjalan pada triwulan II adalah 7.406 proyek, dan penyerapan tenaga kerja atas proyek yang tercatat adalah 16.353 orang, sehingga dapat mengurangi pengangguran yang berdampak meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kebumen.
   e. Pagu Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp.4.708.139.700,- yang terdiri dari 6 program, 12 kegiatan, dan 32 subkegiatan. Target belanja s.d. Juni 2025 sebesar Rp.2.026.643.584 (43.05%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.628.287.339 (34.58%) atau 0,34% dari target. Sedangkan realisasi fisik s.d Juni 2025 sebesar Rp.1.642.872.029 (34,63%) atau 81,06% dari target. Sehingga DPMPTSP s.d. Juni 2025 memperoleh deviasi keuangan sebesar 8,47% dan deviasi fisik sebesar 8,42%.

f. Saldo kas yang tersedia di bank sebesar Rp. 84.237.000,-. Telah dilaksanakan penatausahaan SP2D sebanyak 1 kali UP, 17 kali LS, dan 8 kali pengajuan GU. Berdasarkan penyerapan anggaran/realisasi tersebut, **nilai deviasi SPJ keuangan sebesar 8,47 %**, adapun rincian deviasi per program adalah sebagai berikut :

1) Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar 8,64%;
2) Program pengembangan iklim penanaman modal sebesar 8,40%;
3) Program promosi penanaman modal sebesar 1,68%;
4) Program pelayanan penanaman modal sebesar 12,74%
5) Program pelaksanaan pengendalian penanaman modal sebesar 6,30%;
6) Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebesar 31,7%

g. Adapun beberapa penyebab dari tingginya nilai deviasi yang tersebar ke banyak kegiatan, seperti sebagai berikut :

1) Kegiatan Administrasi Keuangan: Deviasi 16,67% karena kurangnya schedule kegiatan dari Provinsi/Kementerian. Solusi: Koordinasi dengan BPKPD untuk pergeseran anggaran.
2) Kegiatan Administrasi Umum: Deviasi 13% karena penghematan pemakaian alat elektronik. Solusi: Koordinasi dengan BPKPD terkait perubahan anggaran kas.
3) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif: Deviasi 12,79% karena keterlambatan kelengkapan berkas. Solusi: Penyiapan administrasi keuangan.
4) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi: Deviasi 15,17% karena keterlambatan verifikasi kelengkapan berkas. Solusi: Penyiapan administrasi keuangan.
5) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan: Deviasi 14,99% karena keterlambatan pelaksanaan Desk SOP Perizinan. Solusi: Re-schedule kegiatan dan percepat proses SPJ.
6) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan: Deviasi 12,10% karena sosialisasi perizinan belum dilaksanakan. Solusi: Pelaksanaan kegiatan terkait sosialisasi.

7) Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif: Deviasi 12,81% karena pelaksanaan pemantauan kelengkapan perizinan berusaha. Solusi: Percepat proses SPJ.

8) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan: Deviasi 31,17% karena penyusunan schedule undangan dan perjalanan dinas. Solusi: Percepat proses SPJ.

h. Kegiatan yang terlaksana pada triwulan kedua ini adalah seperti peningkatan sarana prasara guna menunjang layanan publik dan meningkatkan kinerja pegawai, seperti pengadaan laptop, PC, scanner, dan printer. Selain itu pelaksanaan penggalian data dan informasi peruntukan lahan kawasan industri sebagai peng-upgrade data potensi daerah Kabupaten Kebumen. Mengikuti event promosi nasional, dan perencanaan kegiatan kebumen fest serta penyusunan materi CJIBF di Provinsi Jawa Tengah untuk mempromosikan potensi daerah. Inspeksi lapangan kepada pelaku usaha, pelaksanaan desk SOP perizinan, monev pelayanan perizinan bersama tenant loket layanan, pelaksanaan FKP SKM, tindaklanjut pengaduan, dan pelayanan jemput bola sebagai upaya peningkatan rasa kepercayaan masyarakat kepada pelayanan publik melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kebumen.

i. Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp.1.490.696.970,- dengan 156 paket, yang terdiri dari 129 paket penyedia dan 27 paket swakelola. Monitoring progres paket dalam tahap kontrak adalah Rp.102.6433.500,-. Pencapaian dari masing-masing indikator pada program kegiatan, antara lain sebagai berikut :

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50%
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	405 Miliar Rupiah	269,50 Miliar Rupiah
Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	5 Dokumen	0 Dokumen
Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan	100%	50 %

	dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik		
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku	40 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi	100%	50%

2. Adapun pembahasan terkait kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :
   a) Adapun peningkatan nilai kepuasan masyarakat melalui penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada MPP Kabupaten Kebumen yaitu pada triwulan kesatu sebesar 89,59% dan triwulan kedua sebesar 94,06%, peningkatan prosentase kepuasan atas layanan adalah 4,47%.
   b) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku usaha atas kegiatan usaha yang terdaftar melalui sistem OSS terlaksana secara rutin dan upaya yang dilakukan berusaha pendampingan pada input progres kegiatan usaha pada aplikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai salah satu indeks ketertiban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.
   c) Terkait realisasi s.d Juni 2025, DPMPTSP mendapat peringkat 10. Peringkat pertama BPKPD, peringkat selanjutnya BKPSDM dan ITDA. Berdasarkan data proyeksi data s.d Juni yang telah dikirimkan, proyeksi realisasi DPMPTSP sebesar 86,76%. Sedangkan realisasi yang diperoleh hanya sebesar 80,33%, walaupun ada selisih realisasi tapi masih aman karena diatas 80%.
   d) Terkait OSS, baru bisa dilaksanakan di bulan Oktober. Ada layanan jemput bola untuk mengupdate pelaku usaha supaya migrasi.
   e) Adanya perubahan kebijakan, aturan perizinan berusaha dicabut. Hasil koordinasi RUPM terakhir, bahwa RUPM Nasional mengalami perubahan. Daerah harus menunggu implementasi RUPM Nasional (berjenjang hingga daerah).

f) Terkait perjalanan dinas luar, setiap tahunnya ada penilaian PTSP dan pelayanan publik (penyediaan). Setiap triwulan harus sinkronisasi data perizinan ke Provinsi, namun tahun ini tidak terpakai karena justru dari Provinsi yang datang ke DPMPTSP. Pagu kami hanya sedikit, namun tidak bisa sesuai rencana.

g) KKPD belum berjalan, karena belum ada Kepala Dinas definitifnya.

h) Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam menunjang kinerja perangkat daerah antara lain sebagai berikut :

1) Pelaksanaan penggalian data dan informasi guna upgrade potensi daerah peruntukan kawasan industry, sehingga menambah pertimbangan bagi calon investor di Kabupaten Kebumen.
2) Mengikuti event promosi Kebumen fest 2025 yang rencananya terselenggara di bulan Agustus dan CJIBF tingkat provinsi Jawa Tengah.
3) Sosialisasi dan rakor implementasi dari PP Nomor 28 Tahun 2025, dan rapat koordinasi pembahasan perizinan berusaha, dan forum grup discussion terkait SOP perizinan dan nonperizinan.
4) Pelaksanaan monev terkait perizinan dan pengaduan.

i) Adapun arahan pimpinan untuk triwulan III dan IV, bisa sesuai target 2025 dan rapat pada hari ini sebagai bahan evaluasi triwulan selanjutnya.

V. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 16 Juli 2025

a.n. Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen
Sekretaris

Puji Rahayu, S.E.
Penata Tk.I - III/d
NIP. 19700604 199301 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Indrakila Nomor 10 Kebumen, Kode Pos 54311 Telp./Fax. (0287) 385925
Laman : www.dpmptsp.kebumenkab.go.id, Pos-el : dpmptspkabkebumen@yahoo.com

Kebumen, 15 Juli 2025

Nomor : 900/1806/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen
2. Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Kebumen
3. Terlampir

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari/ Tanggal	:	Rabu, 16 Juli 2025
Waktu	:	09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat MPP Kabupaten Kebumen
Acara	:	Rapat POP/K Triwulan II TA 2025

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen
Plt. Sekretaris,

Endah Wahjoe Widajati, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196812151996032005

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen
2.	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Kebumen
3.	Kasubbag Umum pada DPMPTSP Kabupaten Kebumen
4.	Pejabat Fungsional pada DPMPTSP Kabupaten Kebumen
5.	Bendahara Pengeluaran pada DPMPTSP Kabupaten Kebumen
6.	Semua Pengelola Keuangan pada DPMPTSP Kabupaten Kebumen

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Indrakila No. 10 Telepon (0287) 385925, Faxsimile (0287) 38592
E-mail : dpmptspkabkebumen@yahoo.com, Website www.dpmptsp.kebumenkab.go.id
Kode Pos 54311

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu, 16 Juli 2025
Waktu : 09 :00 s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP
Acara : Rakor POP Triwulan II Tahun 2025

NO	NAMA	L / P	INSTANSI	TANDA TANGAN
1				1
2	Puji Rahayu	P	DPMPTSP	2
3	Satrio Panji H.	L	— " —	3
4	Endah Wahyu W	P	DPMPTSP	4
5	Sarmini	P	DPMPTSP	5
6	S. Khotimah	P	DPMPTSP	6
7	Wiji Agim	P	DPMPTSP	7
8	Erni Rahayu	P	DPMPTSP	8
9	Agung Dwi L	L	Bag. AP	9
10	Reza Paryastika	P	DPMPTSP	10
11	Annisa Permata. S	P	DPMPTSP	11
12	Nian Annavi'. M	L	DPMPTSP	12
13	Nadia Nur H.	P	DPMPTSP	13
14	M. Nasikhan	L	— " —	14
15	Nur R	P	DPMPTSP	15
16	Rostri Indira	P	DPMPTSP	16
17	Puryaningtyas	P	DPMPTSP	17
18	A. N. Sari	L	Dpmptsp	18
19	Fifi yuliyastuti	P	DPMPTSP	19
20	Suci Ikhtiyani	P	DPMPTSP	20

NO	NAMA	L / P	INSTANSI	TANDA TANGAN
21	Defi Alif	P	DPMPTSP	21
22	Anang S	L	Dpmptsp	22
23	Alfath Yanuar	L	DPMPTSP	23
24	R IO H.K	L	DPMPTSP	24
25	Galih P.W	L	—11—	25
26	Agung Mp	L	—11—	26
27	Laelatul Aisyah	P	—11—	27
28	Chimayatul W	P	—11—	28
29	Vina Dwi R.	P	—11—	29
30	Vanesa Valenia K	P	—11—	30

Kebumen, 16 Juli 2025

Sekretaris Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen

PUJI RAHAYU,S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19700604 199301 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Indrakila No. 10 Kebumen Telp. (0287) 385912, 385925, Fax (0287) 385925
E-Mail: dpmptspkabkebumen@yahoo.com, Website: www.dpmptsp.kebumenkab.go.id
KODE POS 54311

NOTULEN

Hari/Tanggal	:	Rabu, 16 Juli 2025.
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB s.d Selesai.
Acara	:	Rapat Rakor POP/K Triwulan II TA. 2025.
Tempat	:	Ruang Rapat Biru DPMPTSP Kabupaten Kebumen.
Pimpinan Rapat	:	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Kebumen.
Peserta Rapat	:	1. Bagian Administrasi Pembangunan Setda (Mas Agung); 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Pejabat Struktural; 4. Pejabat Fungsional; 5. Bendahara; dan 6. Pengelola Keuangan DPMPTSP.

Pembahasan/Hasil :

Rapat dibuka pada pukul 09.30 WIB oleh Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Kebumen dengan bacaan Basmallah bersama-sama.

1. Kegiatan Rakor POP/K dipaparkan oleh Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Kebumen, dilanjutkan oleh masing-masing PPTK.
2. Peranan DPMPTSP dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen adalah misi kedua, yaitu Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan indikator yang dicapai adalah adalah jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA).
3. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Tahun 2025 adalah Rp.409.000.000.000,-, dengan realisasi investasi s.d Juni 2025 sebesar Rp.269.500.880.753,- atau 65,89%.
4. Revolving Penatausahaan keuangan sebanyak 26 kali dengan rincian 8 kali pengajuan GU, 1 kali pengajuan UP dan 17 kali

pengajuan LS. Saldo Kas per 30 Juni 2025 dengan tidak ada saldo tunai, dan saldo bank sebesar Rp.84.237.000,-.

5. Pagu Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp.4.708.139.700,- yang terdiri dari 6 program, 12 kegiatan, dan 32 subkegiatan. Target belanja s.d. Juni 2025 sebesar Rp.2.026.643.584 (43.05%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.628.287.339 (34.58%) atau 0,34% dari target. Sedangkan realisasi fisik s.d Juni 2025 sebesar Rp.1.642.872.029 (34,63%) atau 81,06% dari target. Sehingga DPMPTSP s.d. Juni 2025 memperoleh deviasi keuangan sebesar 8,47% dan deviasi fisik sebesar 8,42%. Adapun rincian deviasi per program adalah sebagai berikut :
   a. Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar 8,64%;
   b. Program pengembangan iklim penanaman modal sebesar 8,40%;
   c. Program promosi penanaman modal sebesar 1,68%;
   d. Program pelayanan penanaman modal sebesar 12,74%
   e. Program pelaksanaan pengendalian penanaman modal sebesar 6,30%;
   f. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebesar 31,7%
6. Deviasi DPMPTSP sebesar 8,47% masih cukup tinggi. Adapun subkegiatan yang penyumpang deviasi diatas 10% ada 8 subkegiatan, yaitu:
   a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar 16,67%;
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 13,00%;
   c. Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebesar 12,79%;
   d. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kebumen/Kota sebesar 15,17%;
   e. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah sebesar 14,99%.

f. Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko sebesar 12,10%;
g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko sebesar 13,57%;
h. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasi Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebesar 31,17%.

7. Tanggapan dari Bu Sarminah :
   a. Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar 16,67%, dikarenakan di DPMPTSP masih Plt. Kepala Dinas sehingga anggaran rapat tidak terserap maksimal.
   b. Terkait Listrik, dikarenakan ruang Kepala Dinas dan Sekretaris DPMPTSP masih kosong, adanya efisiensi anggaran dan penghematan listrik setelah jam kerja semua elektronik di matikan.
8. Tanggapan dari Bu Vera :
   a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko untuk mengakomodir apabila ada regulasi terbaru dari pusat yang bisa diterapkan di daerah (bersifat penyediaan). UU Cipta Kerja menjadi PP 28 (berlaku per September/Oktober). Nantinya akan dilaksanakan sosialisasi dan koordinasinya.
   b. Adanya perubahan kebijakan, aturan perizinan berusaha dicabut. Hasil koordinasi RUPM terakhir, bahwa RUPM Nasional mengalami perubahan. Daerah harus menunggu implementasi RUPM Nasional (berjenjang hingga daerah).
9. Tanggapan dari Bu Endah :
   a. Ada SPJ makan rapat yang sudah dilaksanakan namun belum dibayarkan di Juni, sehingga deviasi menjadi tinggi.
   b. Selain itu, sudah mengagendakan sosialisasi namun per 5 Juli 2025 ada perubahan PP, sehingga sosialisasi dibatalkan. Mencari referensi dari Kab/Kota lain terlebih dahulu, setelah itu koordinasi dengan OPD Teknis.
   c. Terkait OSS, baru bisa dilaksanakan di bulan Oktober. Ada layanan jemput bola untuk mengupdate pelaku usaha supaya migrasi.

10. Tanggapan dari Bu Erni :
    a. Terkait perjalanan dinas luar, setiap tahunnya ada penilaian PTSP dan pelayanan publik (penyediaan). Setiap triwulan harus sinkronisasi data perizinan ke Provinsi, namun tahun ini tidak terpakai karena justru dari Provinsi yang datang ke DPMPTSP. Pagu kami hanya sedikit, namun tidak bisa sesuai rencana.
11. Tanggapan Bagian Administrasi Pembangunan (Mas Agung):
    a. Terimakasih untuk Rakor POP/K Triwulan II DPMPTSP sudah dilaksanakan. Terkait realisasi s.d Juni 2025, DPMPTSP mendapat peringkat 10. Peringkat pertama BPKPD, peringkat selanjutnya BKPSDM dan ITDA.
    b. Terimakasih untuk reasoning permasalahan dan solusi dengan deviasi diatas 10% sudah mendetail. Berdasarkan data proyeksi data s.d Juni yang telah dikirimkan, proyeksi realisasi DPMPTSP sebesar 86,76%. Sedangkan realisasi yang diperoleh hanya sebesar 80,33%, walaupun ada selisih realisasi tapi masih aman karena diatas 80%.
    c. Penyampaian sistem perizinan by system bukan kirim file/hardfile. Jadi perlu untuk disesuaikan agar penyerapan dapat tercapai.
    d. KKPD sudah berjalan? Jika KKPD sudah berjalan, silahkan koordinasi dengan BPKPD.
12. Tanggapan Bu Oni :
    a. KKPD belum berjalan, karena belum ada Kepala Dinas definitifnya.
13. Terimakasih atas solusi dan evaluasi dari Bagian Administrasi Pembangunan. Semoga untuk triwulan III dan IV, bisa sesuai target 2025 dan rapat pada hari ini sebagai bahan evaluasi triwulan selanjutnya. Rapat ditutup pada pukul 11.00 WIB dengan bacaan Hamdallah bersama-sama.

Notulis



Annisa Permata Sari, S.M.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Nama	:	Rakor POP/K Triwulan II Tahun 2025.
Hari/Tanggal	:	Rabu, 16 Juli 2025.
Waktu	:	Pukul 09.00 WIB s.d. Selesai.
Tempat	:	Ruang Rapat Biru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kebumen.









RAKOR POP TRIWULAN II

DPMPTSP KAB.KEBUMEN

PEMERINTAH
KABUPATEN
KEBUMEN

RAKOR POP

TRIWULAN II TAHUN 2025



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN







KEBUMEN, 16 Juli 2025

DASAR HUKUM

01 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024. Permendagri ini mengatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

02 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

03 Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

04 Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Pedoman pelaksanaan dan pengendalian kegiatan APBD.

05 Surat Edaran Sekretaris Daerah Kab. Kebumen Nomor 000/2247/2025 Tentang Rakor POP Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025

VISI dan MISI



VISI

"Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman Maju, Sejahtera, dan Berbudaya"

Misi 1

Pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkeadilan serta pemberdayaan pesantren dan pendidikan keagamaan

Misi 2

Memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan Pariwisata, UMKM yang inovatif dan berkelanjutan

Misi 3

Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

Misi 4

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi

Misi 5

Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal yang kuat



Peranan DPMPTSP dalam Mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen

Misi Kedua : Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan berkelanjutan

Penjelasannya: Misi ini untuk mewujudkan Visi Kebumen Sejahtera, maka kerangka kerja yang harus dilakukan adalah: meningkatkan produktifitas sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan pariwisata, UMKM, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan keberlanjutan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi

TUJUAN

Meningkatkan perekonomian yang berbasis potensi lokal

Indikator : Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota

SASARAN

Meningkatkan perekonomian sektor primer

Indikator : Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Permendagri Nomor 25 Tahun 2021

Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

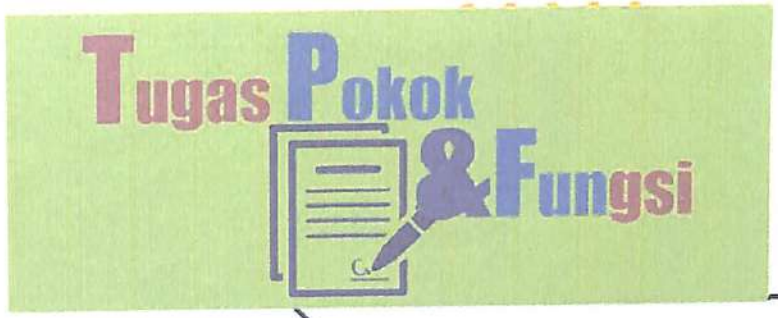
Sesuai BAB III tugas, fungsi, dan susunan organisasi:

DPMPTSP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu



Peraturan Bupati Kebumen Nomor 120 Tahun 2021
Tentang Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kab.Kebumen

"Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu"



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU)	NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL PMDN/PMA
Rumus	(Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional dalam rupiah tahun (n) – Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional dalam rupiah tahun 2020 (388.644.285.520)/Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional dalam rupiah tahun 2020 x 100 %

65,89 %

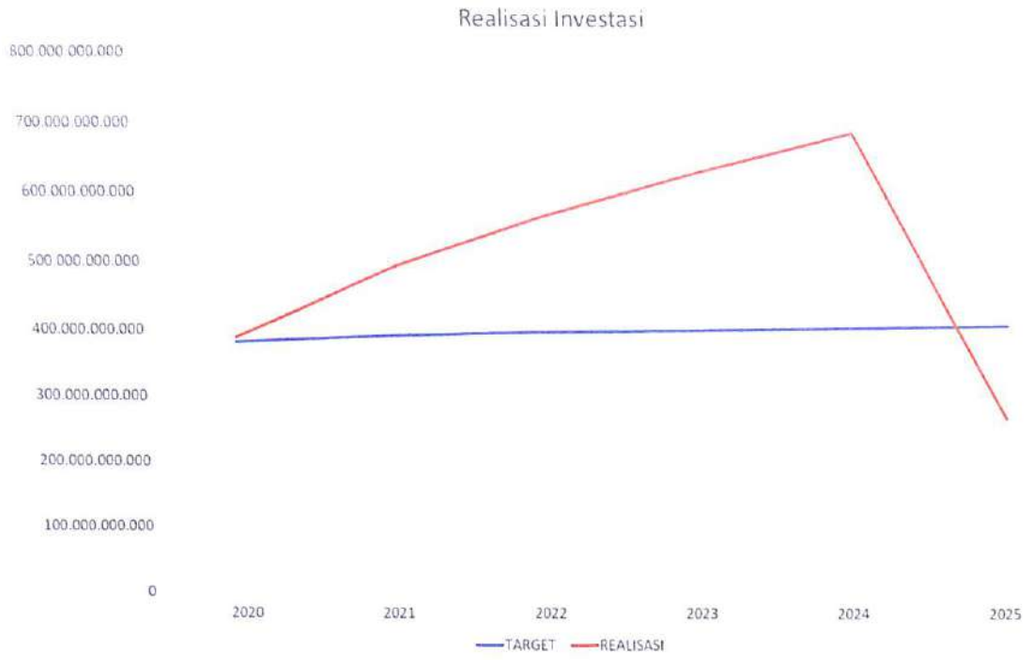
TARGET
Rp. 409.000.000.000,-

REALISASI
Rp. 269.500.880.753,-

Realisasi s/d Juni 2025

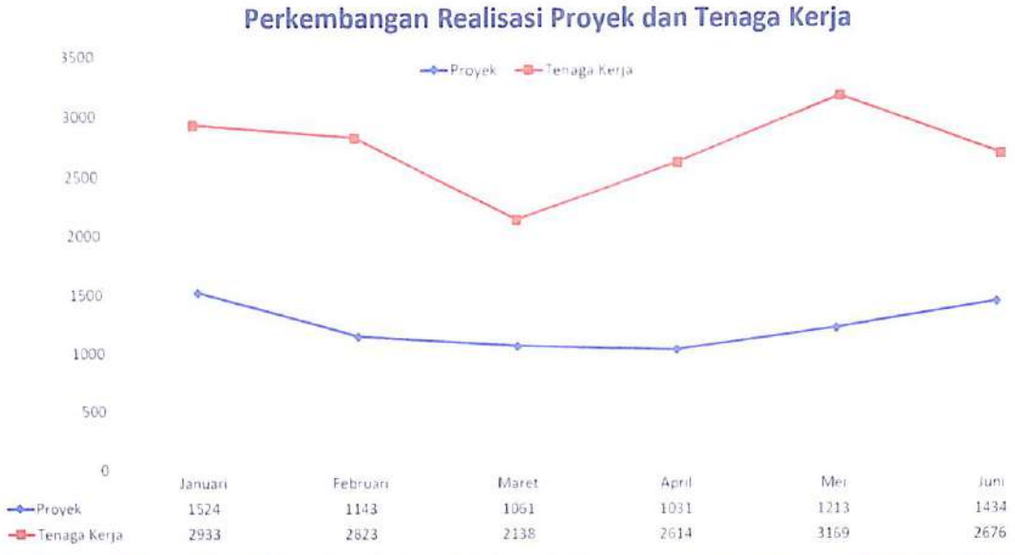


REALISASI INVESTASI (2020 - 2025 Triwulan II)



Tahun	Investasi PMA/PMDN	
	Target	Realisasi
2020	382.000.000.000	388.644.285.520
2021	392.000.000.000	488.529.005.110
2022	397.000.000.000	564.646.202.367
2023	401.000.000.000	628.230.300.587
2024	405.000.000.000	686.760.779.257
2025 (Tw II)	409.000.000.000	269.500.880.753

Realisasi s/d Bulan Juni 2025



Dalam kegiatannya DPMPTSP Kab.Kebumen melalui promosi investasi dan pengawasan pelaku usaha saling melengkapi dalam upaya mengurangi kemiskinan. Promosi investasi menciptakan peluang ekonomi dan lapangan kerja, sementara pengawasan memastikan bahwa investasi dilakukan dengan dil dan transparan.

1. **Pada investor baru/penanam modal**, DPMPTSP memiliki peran untuk investasi yang masuk ke daerah biasanya diikuti dengan pembukaan bisnis baru dan ekspansi usaha, yang berpotensi menciptakan lapangan kerja. Semakin banyak investasi, semakin banyak pula peluang kerja untuk masyarakat setempat.
2. **Sektor industri :** Investasi yang berhasil difasilitasi dapat memicu pertumbuhan berbagai sektor industri di daerah, seperti manufaktur, perdagangan, dan jasa, yang semuanya dapat menyerap tenaga kerja.
3. **Usaha Kecil dan Menengah (UKM) :** DPMPTSP juga dapat membantu dalam pengembangan UMKM dengan memberikan dukungan dalam bentuk perizinan yang lebih mudah dan bimbingan. UKM yang kuat dapat berperan besar dalam perekonomian lokal dan menyerap tenaga kerja.
4. **Fokus pada Wilayah Kurang Berkembang :** DPMPTSP dapat menerapkan kebijakan dan program yang mendorong investasi di daerah-daerah yang kurang berkembang atau terpencil, yang dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di wilayah tersebut.

REKAP LAPORAN KEUANGAN DAN FISIK

PAGU ANGGARAN :
Rp 4.708.139.700,-

Deviasi Keu	**8,47**
Deviasi Fisik	**8,42**





Laporan Progres Keuangan			
Target		**Realisasi**	
2.026.642.684	43,05	1.628.287.339	34,58

Per 30 Juni 2025

Laporan Progres Fisik			
Target		**Realisasi**	
2.026.642.684	43,05	1.642.872.029	34,63

PROGRES PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN



TRIWULAN I

SP2D	Jumlah
UP	1
LS	8
GU	3

NO	TANGGAL	SPM	SP2D	NILAI
1	2 Januari 2025	33.05/04.0/000001/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025	LS	Rp 76.103.131
2	17 Januari 2025	33.05/04.0/000002/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025	UP	Rp 84.237.000
3	21 Januari 2025	33.05/04.0/000003/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025	LS	Rp 68.023.897
4	3 Februari 2025	33.05/04.0/000004/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025	LS	Rp 71.226.008
5	19 Februari 2025	33.05/04.0/000005/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025	LS	Rp 64.970.505
6	18 Februari 2025	33.05/04.0/000006/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/2/2025	GU	Rp 83.517.371
7	3 Maret 2025	33.05/04.0/000007/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/2/2025	LS	Rp 71.226.008
8	12 Maret 2025	33.05/04.0/000008/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025	GU	Rp 80.762.219
9	18 Maret 2025	33.05/04.0/000009/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025	LS	Rp 62.388.644
10	21 Maret 2025	33.05/04.0/000010/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025	LS	Rp 67.984.256
11	25 Maret 2025	33.05/04.0/000011/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025	LS	Rp 28.154.500
12	26 Maret 2025	33.05/04.0/000013/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025	GU	Rp 62.064.800
JUMLAH				**Rp 820.658.339**

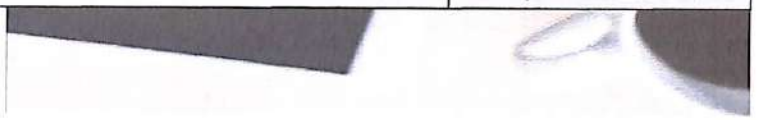
PROGRES PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN



TRIWULAN I

SP2D	Jumlah
UP	-
LS	9
GU	5

NO	TANGGAL	SPM	SP2D	NILAI
1	08 April 2025	33.05/04.0/000012/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025	LS	Rp 71.770.778
2	17 April 2025	33.05/04.0/000014/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025	LS	Rp 62.596.691
3	29 April 2025	33.05/04.0/000016/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025	GU	Rp 79.582.707
4	2 Mei 2025	33.05/04.0/000015/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025	LS	Rp 66.071.774
5	15 Mei 2025	33.05/04.0/000017/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025	LS	Rp 32.268.619
6	16 Mei 2025	33.05/04.0/000018/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025	GU	Rp 78.382.830
7	20 Mei 2025	33.05/04.0/000019/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025	LS	Rp 62.854.514
8	28 Mei 2025	33.05/04.0/000021/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025	GU	Rp 82.328.970
9	02 Juni 2025	33.05/04.0/000020/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025	LS	Rp 64.881.491
10	12 Juni 2025	33.05/04.0/000022/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025	LS	Rp 10.581.589
11	17 Juni 2025	33.05/04.0/000025/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025	GU	Rp 81.499.044
12	19 Juni 2025	33.05/04.0/000023/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025	LS	Rp 62.180.937
13	20 Juni 2025	33.05/04.0/000024/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025	LS	Rp 63.061.156
14	30 Juni 2025	33.05/04.0/000027/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025	GU	Rp 73.804.900
JUMLAH				Rp 891.866.000



SALDO KAS

S/d 30 Juni 2025

Berjumlah :

Rp. 84.237.000,-

Terdiri dari :

1. Saldo Tunai : **Rp. - ,-**
2. Saldo Bank : **Rp. 84.237.000,-**





PROGRES SP2D

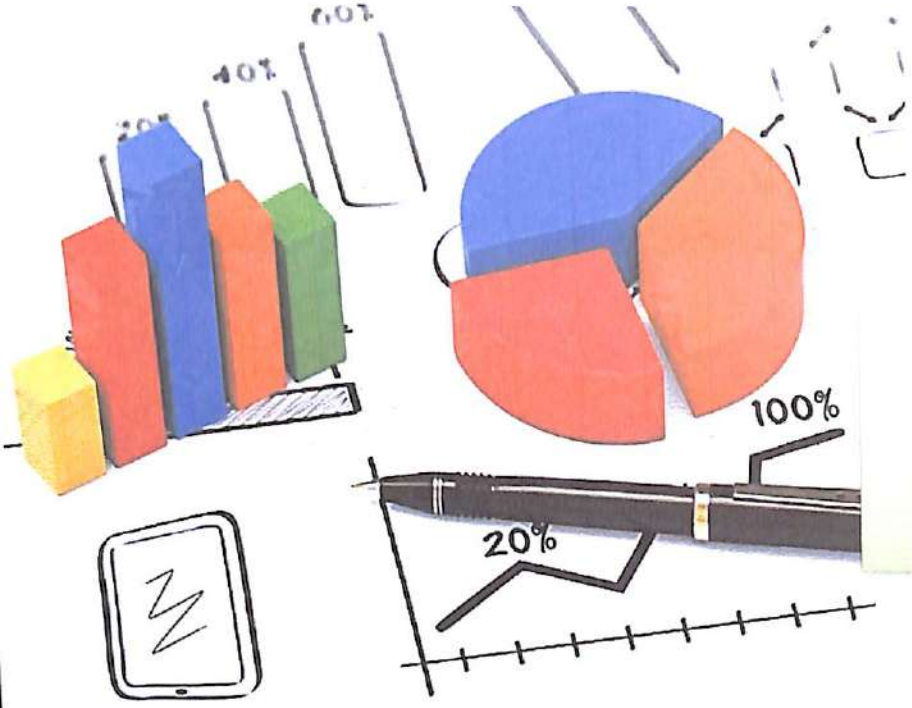
S/d Triwulan II (Juni 2025)

SP2D	Jumlah
UP	1
LS	17
GU	8

Nilai Anggaran :

Rp. 1.712.524.339,-





TARGET DAN REALISASI

TRIWULAN II TAHUN 2025

ANGGARAN BELANJA
TRIWULAN II (s/d Juni 2025)

- Target Belanja
  Rp. 2.026.642.684
- Realisasi Belanja
  Rp. 1.628.287.339

Deviasi :
8,47 %

PAGU ANGGARAN :
Rp. 4.708.139.700

6 Program
12 Kegiatan
31 Subkegiatan

No	Program	Jumlah		Pagu Anggaran	Target Keuangan		Realisasi Keuangan		Deviasi
		Kegiatan	Subkegiatan		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	19	4.241.541.000	1.859.099.684	43,83	1.492.725.681	35,19	8,64
2.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2	4	56,688.300	20.808.900	36,71	16.046.230	28,31	8,40
3.	Promosi Penanaman Modal	1	2	224.462.000	38.667.000	17,23	34.911.198	15,55	1,68
4.	Pelayanan Penanaman Modal	1	3	99.930.500	67.769.500	67,82	55.039.740	55,08	12,74
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	2	64.002.300	27.456.000	42.90	23.427.540	36,60	6,30
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	1	21.515.600	12.841.600	59.69	6.136.950	28,52	31,17

NO	Program/Kegiatan	Pagu	Target		Realisasi		Deviasi Keuangan %	Deviasi Fisik %
			Rp.	%	Rp.	%		
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.241.541.000**	**1.859.099.684**	**43,83**	**1.492.725.681**	**35,19**	**8,64**	**8,64**
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**27.020.000**	**13.149.610**	**48,67**	**12.630.300**	**46,74**	**1,93**	**1,93**
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.490.000	8.502.010	41,49	8.368.300	40,84	0,65	0,65
b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.530.000	4.647.600	71,17	4.262.000	65,27	5,90	5,90
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.320.685.000**	**1.326.550.882**	**39,95**	**1.016.819.511**	**30,62**	**9,33**	**9,33**
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.286.562.000	1.313.988.092	39,98	1.006.344.498	30,62	9,36	9,36
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verfikasi Keuangan SKPD	34.123.000	12.562.790	36,82	10.475.013	30,70	6,12	6,12
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**168.130.000**	**84.375.000**	**50,18**	**75.056.887**	**44,64**	**5,54**	**5,54**
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	15.000.000	50,00	14.767.000	49,22	0,78	0,78
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	14.625.000	48,75	14.025.200	46,75	2,00	2,00
c.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.130.000	14.000.000	51,60	13.911.650	51,28	0,32	0,32
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.250.000	83,33	1.229.000	81,93	1,40	1,40
e.	Penyediaan Bahan Material	28.500.000	17.500.000	61,40	17.400.300	61,05	0,35	0,35
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.500.000	20.500.000	41,41	12.244.637	24,74	16,67	16,67
g.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000	1.500.000	100,00	1.479.100	98,61	1,39	1,39

NO	Program/Kegiatan	Pagu	Target		Realisasi		Deviasi Keuangan %	Deviasi Fisik %
			Rp.	%	Rp.	%		
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**122.069.000**	**122.069.000**	**100,00**	**120.835.560**	**98,99**	**1,01**	**1,01**
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.069.000	122.069.000	100,00	120.835.560	98,99	1,01	1,01
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**421.537.000**	**216.765.192**	**51,42**	**173.407.223**	**41,14**	**10,28**	**10,28**
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.100.000	55,00	1.100.000	55,00	-	-
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	275.000.000	150.350.000	54,67	114.580.908	41,67	13,00	13,00
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.537.000	65.315.192	45,19	57.726.315	39,94	5,25	5,25
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daereah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**182.100.000**	**96.190.000**	**52,82**	**93.976.200**	**51,61**	**1,21**	**1,21**
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000.000	60.000.000	50,00	58.322.200	48,60	1,40	1,40
b.	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	-	-
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.100.000	23.290.000	59,57	23.077.000	59,02	0,55	0,55
d.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	9.900.000	49,50	9.577.000	47,89	1,61	1,61

NO	Program/Kegiatan	Pagu	Target		Realisasi		Deviasi Keuangan %	Deviasi Fisik %
			Rp.	%	Rp.	%		
2.	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**56.688.300**	**20.808.900**	**36,71**	**16.046.230**	**28,31**	**8,40**	**8,40**
1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**32.316.500**	**13.568.100**	**41,99**	**11.317.330**	**35,02**	**6,97**	**6,97**
a.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	28.501.500	11.848.100	41,57	10.085.230	35,38	6,19	6,19
b.	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3.815.000	1.720.000	45,09	1.232.100	32,30	12,79	12,79
2.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**24.371.800**	**7.240.800**	**29,71**	**4.728.900**	**19,40**	**10,31**	**10,31**
a.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	7.155.000	3.161.800	44,19	2.076.500	29,02	15,17	15,17
b.	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	17.216.800	4.079.000	23,69	2.652.400	15,41	8,28	8,28
3.	**Program Promosi Penanaman Modal**	**224.462.000**	**38.667.000**	**17,23**	**34.911.198**	**15,55**	**1,68**	**1,67**
1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**224.462.000**	**38.667.000**	**17,23**	**34.911.198**	**15,55**	**1,68**	**1,67**
a.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	209.483.000	29.356.000	14,01	26.666.698	12,73	1,28	1,28
b.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	14.979.000	9.311.000	62,16	8.244.500	55,04	7,12	7,12

NO	Program/Kegiatan	Pagu	Target		Realisasi		Deviasi Keuangan %	Deviasi Fisik %
			Rp.	%	Rp.	%		
4.	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**99.930.500**	**67.769.500**	**67,82**	**55.039.740**	**55,08**	**12,74**	**11,09**
1.	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**99.930.500**	**67.769.500**	**67,82**	**55.039.740**	**55,08**	**12,74**	**11,09**
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10.204.000	10.204.000	100,00	8.674.800	85,01	14,99	0,55
b.	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	66.126.500	47.965.500	72,54	39.966.940	60,44	12,10	12,10
c.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	23.600.000	9.600.000	40,68	6.398.000	27,11	13,57	12,81
5.	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**64.002.300**	**27.456.000**	**42,90**	**23.427.540**	**36,60**	**6,30**	**6,30**
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**64.002.300**	**27.456.000**	**42,90**	**23.427.540**	**36.60**	**6,30**	**6,30**
a.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	17.400.000	5.841.000	33,57	5.357.140	30,79	2,78	2,78
b.	Pengawasan Penanaman Modal	46.602.300	21.615.000	46,38	18.070.400	38,78	7,60	7,60

NO	Program/Kegiatan	Pagu	Target		Realisasi		Deviasi Keuangan %	Deviasi Fisik %
			Rp.	%	Rp.	%		
6	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**21.515.600**	**12.842.500**	**59,69**	**6.136.950**	**28,52**	**31,17**	**29,32**
1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**21.515.600**	**12.842.500**	**59,69**	**6.136.950**	**28,52**	**31,17**	**29,32**
a.	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayana Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.515.600	12.842.500	59,69	6.136.950	28,52	31,17	29,32

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Deviasi : 16,67%

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

IdentiFikasi :

Penyediaan anggaran guna schedule kegiatan dari Provinsi / Kementerian, namun undangan belum ada sebagai dasar realisasi penyerapan anggaran subkegiatan.

Solusi :

Koordinasi dengan BPKPD terkait dengan pergeseran anggaran guna meminimalisir deviasi akhir tahun

Deviasi : 13,00%

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah

Subkegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber dan air, dan listrik

IdentiFikasi :

Penghematan atas pemakaian alat elektronik yang tidak digunakan setelah waktu kerja selesai

Solusi :

Perlu koordinasi dengan BPKPD terkait perubahan anggaran kas, sehingga dapat meminimalisir deviasi pada akhir periode anggaran

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Deviasi : 12,79%

Program : Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Dibidang Penenaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Subkegiatan : Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

IdentiFikasi :

Keterlambatan dalam kelengkapan berkas saat verifikasi dokumen masih adanya revisi

Solusi :

Sudah menjadi surat berharga, dan dalam proses penyiapan administrasi keuangan atau dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Deviasi : 15,17%

Program : Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Subkegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

IdentiFikasi :

Keterlambatan dalam pengumpulan berkas laporan kelengkapan administrasi kegiatan

Solusi :

Sudah menjadi surat berharga, dan dalam proses penyimpanan administrasi keuangan atau dokumen pertanggungjawaban keuangan

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Deviasi : 14,99%

Program : Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

IdentiFikasi :

1. Keterlambatan pelaksanaan Desk SOP Perizinan
2. Belanja Makan Rapat tanggal 25 Juni yang masih dalam proses SPJ senilai Rp 1.473.340

Solusi :

1. Re-schedule kegiatan dan penyerapan anggaran pada bulan selanjutnya
2. Percepat proses SPJ, agar bisa dibayarkan di bulan Juli

Deviasi : 12,10%

Program : Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan : Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko

IdentiFikasi :

Sosialisasi Pelayanan Perizinan belum dilaksanakan

Solusi :

Keterlambatan pelaksanaan kegiatan terkait sosialisasi PP No 28 tahun 2025, dan perjalananan dinas

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Deviasi : 12,81%

Program : Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan : Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko

IdentiFikasi :

1. Pelaksanaan pemantauan kelengkapan perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha dan nonperizinan terkait kegiatan usaha yang telah terdaftar di system, tetapi administrasi belum selesai
2. Belanja BBM tanggal 26 Juni masih dalam proses SPJ senilai Rp 6.576.200

Solusi :

1. Dalam proses penyiapan administrasi keuangan atau dokumen pertanggungjawaban keuangn, dan rencana kegiatan pemantauan kelengkapan berkas di beberapa kegiatan usaha
2. Percepat proses SPJ agar bisa dibayarkan di bulan Juli

Deviasi : 31,17%

Program : Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Subkegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

IdentiFikasi :

1. Penyusunan schedule undangan dari Provinsi Jawa Tengah terkait dengan sinkronikasi data berbasis system informasi, dan adanya perjalanan dinas terkait study banding SOP Perizinan berusha dan non perizinan yang belum terlaksana
2. Belanja Makan rapat bulan Juni masih dalam proses SPJ senilai Rp 6.535.150

Solusi :

1. Adanya rencana kegiatan pelaksanaan perjalanan dinas terkait study banding SOP perizinan berusaha dan non perizinan
2. Percepat proses SPJ agar bisa dibayarkan di bulan Juli

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II
(s/d Juni 2025)

PAGU ANGGARAN :
Rp. 4.708.139.700,-

No	Program	Pagu Anggaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,241,541,000	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	50
2.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	56,688,300	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	Miliar Rupiah	409	269,50
3.	Promosi Penanaman Modal	224,462,000	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	Dokumen	5	-
4.	Pelayanan Penanaman Modal	99,930,500	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	Persen	100	50
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	64,002,300	Jumlah Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku	Kegiatan Usaha	40	20
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	21,515,600	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi	Persen	100	50

KEGIATAN YANG TERLAKSANA PADA TRIWULAN II

PAGU ANGGARAN : Rp. 4.708.139.700,-

No	Program	Rincian aktivitas kegiatan	Ket.
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Telah melaksanaan kegiatan : 1. Pengadaan Sarana Prasarana (Pc, Laptop, Scanner, dan Printer)	*Pejabat Pengadaan, dan Pihak Ketiga*
2.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Telah melaksanaan kegiatan : 1. Penggalian data dan informasi peruntukan lahan kawasan industri	*Internal OPD*
3.	Promosi Penanaman Modal	Telah melaksanaan kegiatan : 1. Penyusunan materi CJIBF Provinsi Jateng 2. Mengikuti kegiatan Capasity Building Prov.Jateng, One on one meeting dengan pelaku usaha oleh Keris Jateng 3. Penyusunan planning kegiatan Kebumen fest (Kebumen expo, bussines dialog, dan one on one meeting 4. Penggalian data dan informasi potensi investment challenge tahun 2025	*Internal OPD, Prov.Jateng, dan OPD terkait*

KEGIATAN YANG TERLAKSANA PADA TRIWULAN II

PAGU ANGGARAN : Rp. 4.708.139.700,-

No	Program	Rincian aktivitas kegiatan	Ket.
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Telah melaksanaan kegiatan : 1. Rakor pembahsan izin secara rutin 2. Desk SOP pelayanan perizinan dan Standar Pelayanan 3. Visitasi perizinan bersama tim teknis	*Intern OPD, Pelaku usaha, dan Tim Teknis*
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Telah melaksanaan kegiatan : 1. Pelaksanaan klinik LKPM triwulan I 2. Inspeksi lapangan rutin kepada 20 pelaku usaha (10 pelaku usaha/bulan)	
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Telah melaksanaan kegiatan : 1. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Survey Kepuasan Masyarakat (FKP SKM) 2. Hasil tindak lanjut pelaksanaan FKP tersebut 3. Tindaklanjut pengaduan 4. Pelayanan jemput bola 5. Rapat rutin 6. Rapat dengan Kementerian	*Internal, Tim Teknis, Akademisi, UMKM, , Tenant, Wartawan, dan Public*

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

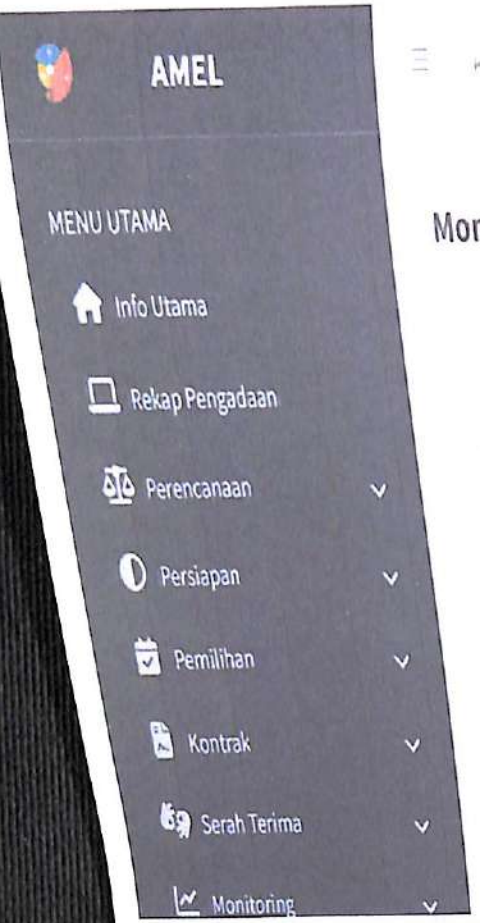


LPSE LKPP

Total RUP Tahun 2025 adalah **Rp. 1.490.696.970,-**

Jumlah 156 Paket

- Paket Penyedia
  - Rp. 1.336.015.730,-
  - 129 paket penyedia
- Paket Swakelola
  - Rp. 154.696.970,-
  - 27 paket swakelola



Kab Kebumen - 2025 - 63485 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TSP

Monitoring Struktur Anggaran

Total Anggaran	Rp. 1.741.753.000	**Belanja Pengadaan**	Rp. 1.619.684.000
Belanja Non Pengadaan	Rp. 122.069.000	**Belanja Operasi**	Rp. 1.619.684.000
Belanja Modal	Rp. 0	**Belanja Tidak Terduga**	Rp. 0
Belanja Non Pengadaan Lainnya	Rp. 0		

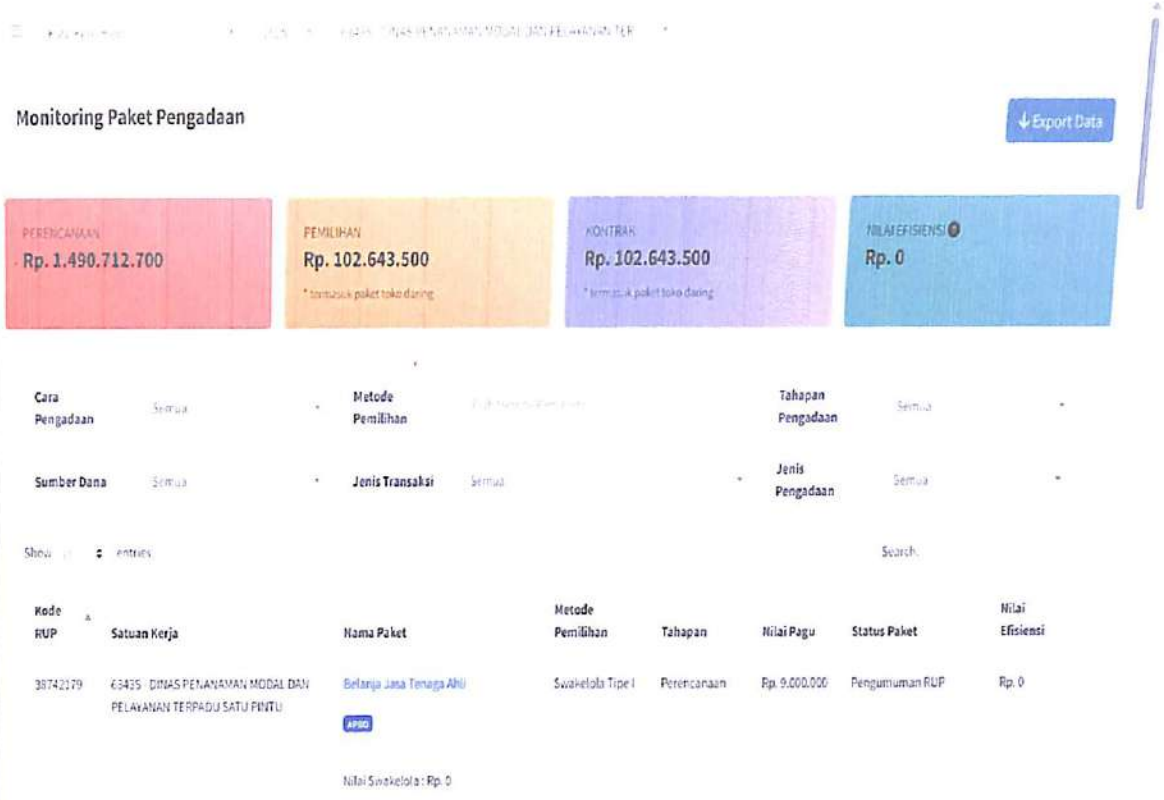
MONITORING PAKET RUP

Perincian setiap tahapan belanja yang telah dilaksanakan melalui

E-Purchasing (https://spse.inaproc.id/kebumenkab/amel/monitoring)

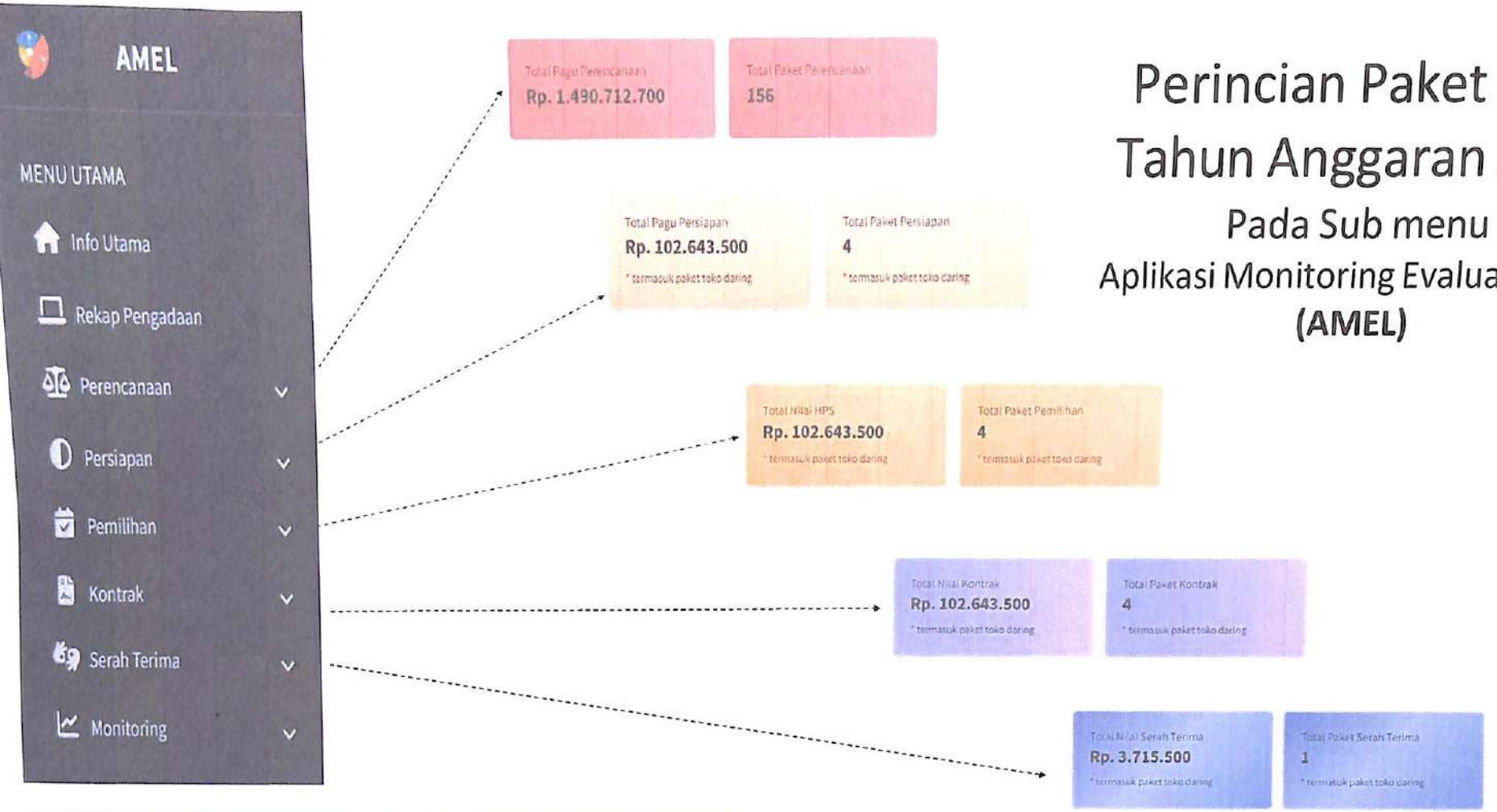
Tahapan	Jumlah
Tahap Perencanaan	Rp. 1.490.712.700
Tahap Pemilihan	Rp. 102.643.500
Tahap Kontrak	Rp. 102.643.500
Nilai Efisiensi	Rp. 0





Perincian Paket LPSE Tahun Anggaran 2025

Pada Sub menu Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal **(AMEL)**





MAL PELAYANAN PUBLIK

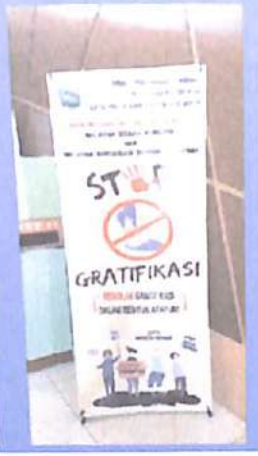


KOMITMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS













JUMLAH LAYANAN DI MPP KEBUMEN

23 OPD / INSTANSI
171 LAYANAN

- SAMSAT (1 LAYANAN)
- DPMPTSP (12 SEKTOR PBBR/OSS RBA, 55 PERIZINAN NON BERUSAHA, DAN 7 NON PERIZINAN)
- KPP PRATAMA (8 LAYANAN)
- PENGADILAN AGAMA (1 LAYANAN)
- DISDUKCAPIL (5 LAYANAN)
- DINKES PPKB (12 LAYANAN)
- BPOM (6 LAYANAN)
- BPJS KESEHATAN (3 LAYANAN)
- DPUPR (3 LAYANAN)
- DLHKP (1 LAYANAN)
- DISPERKIMHUB (2 LAYANAN)
- PDAM (3 LAYANAN)
- PENGADILAN NEGERI (6 LAYANAN)
- KEJAKSAAN NEGERI (7 LAYANAN)
- TASPEN (7 LAYANAN)
- PLN (3 LAYANAN)
- BPJS KETENAGAKERJAAN (5 LAYANAN)
- KEMENAG (6 LAYANAN)
- BPKPD (3 LAYANAN)
- BANK JATENG (6 LAYANAN)
- IMIGRASI (1 LAYANAN)
- DISNAKER (2 LAYANAN)
- BP3M (5 LAYANAN)

PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jumlah Pemohon di MPP Kabupaten Kebumen

1. Bulan Januari : 5814 pemohon
2. Bulan Februari : 4996 pemohon
3. Bulan Maret : 4889 pemohon
4. Bulan April : 6736 pemohon
5. Bulan Mei : 6114 pemohon
6. Bulan Juni : 7369 pemohon

Jumlah Pengendalian kegiatan usaha di Kabupaten/Kota

1. Bulan Januari : 10 Pelaku Usaha
2. Bulan Februari : 10 Pelaku Usaha
3. Bulan Maret : 10 Pelaku Usaha
4. Bulan April : - Pelaku Usaha
5. Bulan Mei : 10 Pelaku Usaha
6. Bulan Juni : 10 Pelaku Usaha

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen

1. Triwulan I : 89.59 %
2. Triwulan II : 94.06 %

LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN III

No	Program	Aktivitas Kegiatan	Keterangan
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Pelaksanaan kegiatan lapangan terkait dengan penggalian data dan informasi peruntukan lahan kawasan industri	1. Bulan Juli 2025
2.	Promosi Penanaman Modal	1. Mengikuti CJIBF tingkat Provinsi Jawa Tengah 2. Mengikuti Kebumen Fest 2025	1. Minggu ketiga bulan Juli 2. 23 – 30 Agustus 2025
3.	Pelayanan Penanaman Modal	1. Sosialisasi dan Rakor implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 2. Desk SOP Perizinan 3. FGD SOP Perizinan 4. Rakor perizinan rutin	1. Bulan Juli 2025 2. Bulan Agustus 2025 3. Bulan Juli-September 2025
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Inspeksi lapangan rutin 2. Klinik LKPM Triwulan II	1. Setiap bulan rutin 2. 1 – 10 Juli 2025
5.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Rapat koordinasi data perizinan triwulan II dan penyusunan laporan PTSP triwulan II 2. Monev tindak lanjut hasil SKM triwulan II dan penyusunan laporannya	1. Bulan Juli 2025 2. Bulan Juli 2025

TERIMA KASIH



dpmptspkebumen



DPMPTSP Kabupaten Kebumen



DPMPTSP Kabupaten Kebumen



dpmptspkabkebumen@yahoo.com



dpmptsp.kebumenkab.go.id

INFORMASI LEBIH LANJUT

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN JUNI

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.241.541.000**		**1.859.099.684**	**43,83**	**43,84**	**1.176.121.354**	**316.604.327**	**1.492.725.681**	**35,19**	**35,19**	**8,64**	**8,65**		
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**27.020.000**		**13.149.610**	**48,67**	**48,67**	**12.630.300**		**12.630.300**	**46,74**	**46,74**	**1,93**	**1,93**		
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.490.000	APBD (DAU Earmarked)	8.502.010	41,49	41,50	8.368.300		8.368.300	40,84	40,84	0,65	0,66		
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.530.000	APBD (DAU Earmarked)	4.647.600	71,17	71,17	4.262.000		4.262.000	65,27	65,27	5,90	5,90		
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.320.685.000**		**1.326.550.882**	**39,95**	**39,96**	**816.069.821**	**200.749.690**	**1.016.819.511**	**30,62**	**30,62**	**9,33**	**9,34**		
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.286.562.000	APBD (DAU Earmarked)	1.313.988.092	39,98	39,99	805.639.325	200.705.173	1.006.344.498	30,62	30,62	9,36	9,37		
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.123.000	APBD (DAU Earmarked)	12.562.790	36,82	36,82	10.430.496	44.517	10.475.013	30,70	30,70	6,12	6,12	BPJS Ketenagakerjaan dianggakan untuk semua Non ASN tapi sekarang hanya 4.	Dibayarkan sesuai kebutuhan.
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**0**	**0,00**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**168.130.000**		**84.375.000**	**50,18**	**50,18**	**58.286.937**	**16.769.950**	**75.056.887**	**44,64**	**44,64**	**5,54**	**5,54**		
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	APBD (DAU Earmarked)	15.000.000	50,00	50,00	11.818.500	2.948.500	14.767.000	49,22	49,22	0,78	0,78		
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	APBD (DAU Earmarked)	14.625.000	48,75	48,75	9.295.900	4.729.300	14.025.200	46,75	46,75	2,00	2,00		
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.130.000	APBD (DAU Earmarked)	14.000.000	51,60	51,60	11.411.000	2.500.650	13.911.650	51,28	51,28	0,32	0,32		
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	APBD (DAU Earmarked)	1.250.000	83,33	83,33	500.000	729.000	1.229.000	81,93	81,93	1,40	1,40		
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	28.500.000	APBD (DAU Earmarked)	17.500.000	61,40	61,40	13.567.800	3.832.500	17.400.300	61,05	61,05	0,35	0,35		
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.500.000	APBD (DAU Earmarked)	20.500.000	41,41	41,41	10.214.637	2.030.000	12.244.637	24,74	24,74	16,67	16,67	Penyediaan anggaran guna schedule kegiatan dari Provinsi/Kementerian, namun undangan belum ada sebagai dasar realisasi penyerapan anggaran sub kegiatan	Koordinasi dengan BPKPD terkait dengan pergeseran anggaran guna meminimalisir deviasi akhir tahun.
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000	APBD (DAU Earmarked)	1.500.000	100,00	100,00	1.479.100		1.479.100	98,61	98,61	1,39	1,39		
JUMLAH		**4.708.139.700**		**2.026.642.684**	**43,05**	**43,05**	**1.272.278.222**	**356.009.117**	**1.628.287.339**	**34,58**	**34,63**	**8,47**	**8,42**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**122.069.000**		**122.069.000**	**100,00**	**100,00**	**72.690.570**	**48.144.990**	**120.835.560**	**98,99**	**98,99**	**1,01**	**1,01**		
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.069.000	APBD (DAU Earmarked)	122.069.000	100,00	100,00	72.690.570	48.144.990	120.835.560	98,99	98,99	1,01	1,01		
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**421.537.000**		**216.765.192**	**51,42**	**51,42**	**140.943.426**	**32.463.797**	**173.407.223**	**41,14**	**41,14**	**10,28**	**10,28**		
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	APBD (DAU Earmarked)	1.100.000	55,00	55,00	1.100.000		1.100.000	55,00	55,00	0,00	0,00		
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.000.000	APBD (DAU Earmarked)	150.350.000	54,67	54,67	94.448.811	20.132.097	114.580.908	41,67	41,67	13,00	13,00	Penghematan atas pemakaian alat elektronik yang tidak digunakan setelah waktu kerja selesai.	Perlunya koordinasi dengan BPKPD terkait perubahan anggaran kas, sehingga dapat meminimalisir deviasi pada akhir periode anggaran.
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.537.000	APBD (DAU Earmarked)	65.315.192	45,19	45,19	45.394.615	12.331.700	57.726.315	39,94	39,94	5,25	5,25		
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**182.100.000**		**96.190.000**	**52,82**	**52,82**	**75.500.300**	**18.475.900**	**93.976.200**	**51,61**	**51,61**	**1,21**	**1,21**		
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000	APBD (DAU Earmarked)	60.000.000	50,00	50,00	44.616.300	13.705.900	58.322.200	48,60	48,60	1,40	1,40		
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	APBD (DAU Earmarked)	3.000.000	100,00	100,00	3.000.000		3.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.100.000	APBD (DAU Earmarked)	23.290.000	59,57	59,57	18.307.000	4.770.000	23.077.000	59,02	59,02	0,55	0,55		
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	APBD (DAU Earmarked)	9.900.000	49,50	49,50	9.577.000		9.577.000	47,89	47,88	1,61	1,62		
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**56.688.300**		**20.808.900**	**36,71**	**36,71**	**10.373.630**	**5.672.600**	**16.046.230**	**28,31**	**28,30**	**8,40**	**8,41**		
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**32.316.500**		**13.568.100**	**41,99**	**41,99**	**6.444.830**	**4.872.500**	**11.317.330**	**35,02**	**35,02**	**6,97**	**6,97**		
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	28.501.500	APBD (DAU Earmarked)	11.848.100	41,57	41,57	5.810.030	4.275.200	10.085.230	35,38	35,38	6,19	6,19		
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3.815.000	APBD (DAU Earmarked)	1.720.000	45,09	45,09	634.800	597.300	1.232.100	32,30	32,30	12,79	12,79	Keterlambatan dalam kelengkapan berkas saat verifikasi dokumen masih adanya revisi.	Sudah menjadi surat berharga, dan dalam proses penyiapan administrasi keuangan atau dokumen pertanggungjawaban keuangan.
JUMLAH		**4.708.139.700**		**2.026.642.684**	**43,05**	**43,05**	**1.272.278.222**	**356.009.117**	**1.628.287.339**	**34,58**	**34,63**	**8,47**	**8,42**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**24.371.800**		**7.240.800**	**29,71**	**29,71**	**3.928.800**	**800.100**	**4.728.900**	**19,40**	**19,41**	**10,31**	**10,30**		
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	7.155.000	APBD (DAU Earmarked)	3.161.800	44,19	44,19	1.776.500	300.000	2.076.500	29,02	29,02	15,17	15,17	Keterlambatan dalam pengumpulan berkas laporan kelengkapan administrasi kegiatan.	Sudah menjadi surat berharga, dan dalam proses penyimpanan administrasi keuangan atau dokumen pertanggungjawaban keuangan.
2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	17.216.800	APBD (DAU Earmarked)	4.079.000	23,69	23,69	2.152.300	500.100	2.652.400	15,41	15,41	8,28	8,28		
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**224.462.000**		**38.667.000**	**17,23**	**17,22**	**20.278.398**	**14.632.800**	**34.911.198**	**15,55**	**15,55**	**1,68**	**1,67**		
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**224.462.000**		**38.667.000**	**17,23**	**17,22**	**20.278.398**	**14.632.800**	**34.911.198**	**15,55**	**15,55**	**1,68**	**1,67**		
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	209.483.000	APBD (DAU Earmarked)	29.356.000	14,01	14,01	15.304.898	11.361.800	26.666.698	12,73	12,73	1,28	1,28		
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	14.979.000	APBD (DAU Earmarked)	9.311.000	62,16	62,16	4.973.500	3.271.000	8.244.500	55,04	55,04	7,12	7,12		
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**99.930.500**		**67.769.500**	**67,82**	**67,82**	**45.085.440**	**9.954.300**	**55.039.740**	**55,08**	**56,73**	**12,74**	**11,09**		
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**99.930.500**		**67.769.500**	**67,82**	**67,82**	**45.085.440**	**9.954.300**	**55.039.740**	**55,08**	**56,73**	**12,74**	**11,09**		
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10.204.000	APBD (DAU Earmarked)	10.204.000	100,00	100,00	7.082.000	1.592.800	8.674.800	85,01	99,45	14,99	0,55	1. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan Desk SOP Perizinan. 2. Belanja Makan Rapat tanggal 25 Juni yang masih dalam proses SPJ senilai Rp 1.473.340	1. Re-schedule kegiatan dan penyerapan anggaran pada bulan selanjutnya. 2. Percepat proses SPJ, agar bisa dibayarkan di bulan Juli.
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	66.126.500	APBD (DAU Earmarked)	47.965.500	72,54	72,54	34.618.740	5.348.200	39.966.940	60,44	60,44	12,10	12,10	Sosialisasi Pelayanan Perizinan belum dilaksanakan	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan terkait sosialisasi PP No 28 tahun 2025, dan perjalanan dinas
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	23.600.000	APBD (DAU Earmarked)	9.600.000	40,68	40,68	3.384.700	3.013.300	6.398.000	27,11	27,87	13,57	12,81	1. Pelaksanaan pemantauan kelengkapan perizinan berusaha dan nonperizinan terkait kegiatan usaha yang telah terdaftar di sistem, tetapi administrasi belum selesai. 2. Belanja BBM tanggal 26 Juni masih dalam proses SPJ senilai Rp 6.576.200.	1. Dalam proses penyiapan administrasi keuangan atau dokumen pertanggungjawaban keuangan, dan rencana kegiatan pemantauan kelengkapan berkas di beberapa kegiatan usaha. 2. Percepat proses SPJ agar bisa dibayarkan di bulan Juli.
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN**	**64.002.300**		**27.456.000**	**42,90**	**42,90**	**18.194.500**	**5.233.040**	**23.427.540**	**36,60**	**36,61**	**6,30**	**6,29**		
	JUMLAH	**4.708.139.700**		**2.026.642.684**	**43,05**	**43,05**	**1.272.278.222**	**356.009.117**	**1.628.287.339**	**34,58**	**34,63**	**8,47**	**8,42**		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
							S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	MODAL														
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**64.002.300**		**27.456.000**	**42,90**	**42,90**	**18.194.500**	**5.233.040**	**23.427.540**	**36,60**	**36,61**	**6,30**	**6,29**		
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	17.400.000	APBD (DAU Earmarked)	5.841.000	**33,57**	33,57	1.893.000	3.464.140	5.357.140	30,79	30,79	2,78	2,78		
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			0	**0,00**	0,00	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	46.602.300	APBD (DAU Earmarked)	21.615.000	**46,38**	46,38	16.301.500	1.768.900	18.070.400	38,78	38,78	7,60	7,60		
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**21.515.600**		**12.841.600**	**59,69**	**59,69**	**2.224.900**	**3.912.050**	**6.136.950**	**28,52**	**30,37**	**31,17**	**29,32**		
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**21.515.600**		**12.841.600**	**59,69**	**59,69**	**2.224.900**	**3.912.050**	**6.136.950**	**28,52**	**30,37**	**31,17**	**29,32**		
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.515.600	APBD (DAU Earmarked)	12.841.600	**59,69**	59,69	2.224.900	3.912.050	6.136.950	28,52	30,37	31,17	29,32	1. Penyesuain schedule undangan dari Provinsi Jawa Tengah terkait dengan sinkronisasi data berbasis sistem informasi, dan adanya perjalanan dinas terkait study banding SOP Perizinan berusaha dan non perizinan yang belum terlaksana. 2. Belanja Makan rapat bulan Juni yangmasih dalam proses SPJ senilai Rp 6.535.150.	1. Adanya rencana kegiatan pelaksanaan perjalanan dinas terkait study banding SOP perizinan berusaha dan non perizinan. 2. Percepat proses SPJ agar bisa dibayarkan di bulan Juli.
JUMLAH		**4.708.139.700**		**2.026.642.684**	**43,05**	**43,05**	**1.272.278.222**	**356.009.117**	**1.628.287.339**	**34,58**	**34,63**	**8,47**	**8,42**		

Kebumen, -

Kepala DPMPTSP

Joni Permawan, S.T.,M.T.

NIP. 19700328 199803 1 00

PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL
TRIWULAN I TAHUN 2025

WILAYAH : KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sektor/Sub Sektor	Januari			Februari			Maret			Jumlah		
		Jml Proyek	Investasi	Naker	Jml Proyek	Investasi	Naker	Jml Proyek	Investasi	Naker	Jml Proyek	Investasi	Naker
I	**Sektor Primer**												
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	7	196.500.000	21	-	-	-	14	660.500.000	41	21	857.000.000	62
2	Peternakan	15	1.149.800.000	27	21	2.641.500.000	45	4	130.000.000	8	40	3.921.300.000	80
3	Kehutanan	-	-	-	-	-	-				-	-	-
4	Perikanan	2	60.000.000	5	11	593.000.000	38	3	77.645.366	5	16	730.645.366	48
5	Pertambangan	-	-	-	-	-	-	1	400.000.000	5	1	400.000.000	5
II	**Sektor Sekunder**												
6	Industri Makanan	258	2.352.085.664	592	162	2.327.600.000	386	173	952.121.000	235	593	5.631.806.664	1.213
7	Industri Tekstil	11	521.000.000	40	-	-	-	9	155.000.000	34	20	676.000.000	74
8	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1	1	10.000.000	1
9	Industri Kayu	6	82.800.000	8	10	176.500.000	16	1	200.000.000	2	17	459.300.000	26
10	Industri Kertas & Percetakan	1	4.500.000	2	-	-	-	1	100.000.000	3	2	104.500.000	5
11	Industri Kimia & farmasi	-	-	-	1	1.700.000	2				1	1.700.000	2
12	Industri Karet dan Plastik	-	-	-	-	-	-				-	-	-
13	Industri Mineral non Logam	-	-	-	-	-	-				-	-	-
14	Industri Logam, Mesin & Elektronik	10	222.171.000	23	11	499.000.000	24	6	80.500.000	21	27	801.671.000	68
15	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam	-	-	-	-	-	-				-	-	-
16	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	-	-	-	-	-	-				-	-	-
17	Industri Lainnya	26	902.774.000	98	28	1.304.900.000	107	14	338.000.000	52	68	2.545.674.000	257
III	**Sektor Tersier**												
1	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-	-	-				-	-	-
2	Konstruksi	15	11.624.976.112	60	55	4.130.500.000	175	48	6.706.000.000	111	118	22.461.476.112	346
3	Perdagangan & Reparasi	907	28.478.552.795	1.127	684	21.400.950.266	1.214	531	13.804.632.998	686	2.122	63.684.136.059	3.027
4	Hotel dan Restoran	45	735.000.000	77	81	1.030.500.000	156	34	3.037.500.000	177	160	4.803.000.000	410
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	7	1.153.000.000	19	27	853.000.000	7	2	150.000.000	4	36	2.156.000.000	30
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	-	-	-	-	-	-				-	-	-
7	Jasa Lainnya	214	14.171.030.202	834	52	13.474.662.183	653	219	13.967.652.141	753	485	41.613.344.526	2.240
	JUMLAH	1.524	61.654.189.773	2.933	1.143	48.433.812.449	2.823	1.061	40.769.551.505	2.138	3.728	150.857.553.727	7.894

Kebumen, 10 April 2025
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen

Muhamad Arifin, S.Si., MT.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19680722 199903 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL
TRIWULAN II TAHUN 2025

WILAYAH : KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sektor/Sub Sektor	April			Mei			Juni			Jumlah		
		Jml Proyek	Investasi	Naker	Jml Proyek	Investasi	Naker	Jml Proyek	Investasi	Naker	Jml Proyek	Investasi	Naker
I	Sektor Primer												
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	-	-	-	13	495.000.000	42	7	33.500.000	9	20	528.500.000	51
2	Peternakan	15	975.000.000	33	18	814.534.456	42	230	340.600.000	40	263	2.130.134.456	185
3	Kehutanan	-	-	-							-	-	-
4	Perikanan	1	10.000.000	1	7	106.000.000	25	11	194.000.000	20	19	310.000.000	46
5	Pertambangan	-	-	-	3	2.350.000.000	33	1	300.000.000	13	4	2.650.000.000	52
II	Sektor Sekunder												
6	Industri Makanan	332	1.582.125.000	403	552	2.363.000.000	894	557	2.211.810.000	888	1.441	6.156.935.000	2.185
7	Industri Tekstil	16	163.300.000	52	4	85.500.000	8	21	27.260.000	58	41	476.060.000	118
8	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Industri Kayu	8	227.000.000	12	4	301.500.000	22	12	476.500.000	49	24	1.005.000.000	83
10	Industri Kertas & Percetakan	-	-	-	2	85.000.000	5	2	125.678.000	3	4	210.678.000	8
11	Industri Kimia & farmasi	-	-	-	2	4.000.000	4	-	-	-	2	4.000.000	4
12	Industri Karet dan Plastik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Industri Mineral non Logam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Industri Logam, Mesin & Elektronik	4	156.100.000	24	7	150.750.000	12	11	104.800.000	17	22	441.650.000	53
15	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Industri Lainnya	25	289.560.020	67	43	3.011.500.000	173	53	2.498.950.000	203	121	5.800.010.020	443
III	Sektor Tersier												
1	Listrik, Gas, dan Air	2	8.600.000	5	1	74.004.410	8				3	32.604.410	13
2	Konstruksi	20	1.269.300.000	65	23	2.701.000.000	84	13	490.000.000	33	56	4.480.300.000	182
3	Perdagangan & Reparasi	429	17.877.812.000	1.116	367	21.699.226.526	911	352	7.241.150.000	423	1.148	46.818.188.526	2.450
4	Hotel dan Restoran	1	500.000.000	4	16	615.000.000	61				17	1.115.000.000	65
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	7	4.632.200.000	28	8	712.000.000	40	5	1.050.000.000	12	20	6.394.200.000	90
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Jasa Lainnya	271	13.733.665.356	794	143	11.154.431.258	799	159	15.211.950.000	909	473	40.080.046.614	2.501
	JUMLAH	1.031	41.644.662.376	2.614	1.213	45.692.446.650	3.169	1.434	30.306.218.000	2.676	3.678	118.643.327.026	8.459

Kebumen, 4 Juli 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KEBUMEN
DPMPTSP
KEBUMEN

IDRI HERNAWAN, ST., MT
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19701228 199803 1 006

FORMULIR E.80
EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN
PERIODE PELAKSANAAN : 2025

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD :

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										Unit Penanggungjawab
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		
1	2	3	4	5	6		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Investasi																																				
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**	**686,76**	**2.025**	**769.631.000**	**397**	**145.000.000**	**401**	**74.900.000**	**405**	**92.504.000**	**409**	**158.448.000**	**413**	**163.000.000**	**563**	**132.357.937**	**628,23**	**73.995.278**	**686,76**	**90.426.260**	**622,59**	**31.987.490**	**0**		**141,81**	**91,28**	**156,67**	**98,79**	**169,57**	**97,75**	**152,22**	**20,19**	**0,00**	**0,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2	5	450.612.000	1	85.000.000	1	43.000.000	1	73.259.000	1	92.883.000	1	95.000.000	1	79.993.598	2	42.237.850	2	71.886.810	0	15.431.580	0		100,00	94,11	200,00	98,23	200,00	98,13	0,00	16,61	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi investasi dan peluang usaha	2	10	319.019.000	2	60.000.000	2	31.900.000	2	19.245.000	2	65.565.000	2	68.000.000	2	52.364.339	2	31.757.428	2	18.539.450	1	16.555.910			100,00	87,27	100,00	99,55	100,00	96,33	50,00	25,25			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota**	**35**	**2**	**1.274.225.000**	**45**	**240.000.000**	**50**	**223.983.000**	**55**	**439.235.000**	**2**	**262.265.000**	**2**	**270.134.000**	**45**	**237.325.700**	**50**	**219.049.650**	**35**	**304.087.429**	**0**	**255.393.098**	**0**		**100,00**	**98,89**	**100,00**	**97,80**	**63,64**	**69,23**	**0,00**	**97,38**	**0,00**	**0,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	5	20	1.274.225.000	4	240.000.000	4	223.983.000	4	439.235.000	2	262.265.000	2	270.134.000	16	237.325.700	10	219.049.650	5	304.087.429	1	255.393.098	0		400,00	98,89	250,00	97,80	125,00	69,23	50,00	97,38	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**	**65**	**100**	**1.983.797.000**	**100**	**373.330.000**	**100**	**283.240.000**	**100**	**342.389.000**	**100**	**408.875.000**	**100**	**420.190.000**	**25**	**344.619.719**	**25**	**282.914.312**	**65**	**326.979.419**	**37,5**	**81.498.680**	**0**		**25,00**	**92,31**	**25,00**	**99,89**	**65,00**	**95,50**	**37,50**	**19,93**	**0,00**	**0,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100	500	1.983.797.000	100	373.330.000	100	283.240.000	100	342.389.000	100	408.875.000	100	420.190.000	100	344.619.719	100	282.914.312	100	326.979.419	100	81.498.680	0		100,00	92,31	100,00	99,89	100,00	95,50	100,00	19,93	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku**	**29,8**	**31,89**	**2.415.281.000**	**27**	**422.462.000**	**28,56**	**399.188.000**	**29,67**	**604.104.000**	**30,78**	**505.347.000**	**31,89**	**520.507.000**	**27**	**393.324.865**	**29**	**393.488.420**	**29,8**	**566.080.590**	**24**	**41.741.460**	**0**		**100,00**	**93,10**	**101,54**	**98,57**	**100,44**	**93,71**	**77,97**	**8,26**	**0,00**	**0,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
																								Rata-rata capaian kinerja (%)	111,41	91,38	120,17	98,38	137,47	79,67	93,33	56,71	0,00	0,00	
																								Predikat Kinerja	ST	ST	ST	ST	ST	T	ST	R	SR	SR	

Faktor pendorong pencapaian kinerja:	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	
Usulan tindak lanjut yang pada Renja Perangkat Daerah berikutnya:	
Usulan tindak lanjut yang pada Renstra Perangkat Daerah berikutnya:	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										Unit Penanggungjawab
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		
1	2	3	4	5	6		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku	108	108	2.415.281.000	108	422.462.000	48	399.188.000	108	604.104.000	108	505.347.000	108	520.507.000	108	393.324.865	48	393.488.420	108	566.080.590	114	41.741.460	0		100,00	93,10	100,00	98,57	100,00	93,71	105,56	8,26	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Prosentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi**	**530**	**100**	**212.367.000**	**100**	**40.000.000**	**100**	**23.880.000**	**100**	**21.571.000**	**100**	**43.710.000**	**100**	**45.021.000**	**150**	**40.000.000**	**250**	**23.629.960**	**530**	**21.357.700**	**150**	**15.078.972**	**0**		**150,00**	**100,00**	**250,00**	**98,95**	**530,00**	**99,01**	**150,00**	**34,50**	**0,00**	**0,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Secara Elektornik	4	2	212.367.000	2	40.000.000	4	23.880.000	2	21.571.000	2	43.710.000	2	45.021.000	2	40.000.000	4	23.629.960	4	21.357.700	3	15.078.972	0		100,00	100,00	100,00	98,95	200,00	99,01	150,00	34,50	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**6.867.117.000**	**100**	**5.043.141.000**	**100**	**3.962.509.000**	**100**	**4.854.994.000**	**100**	**4.725.490.000**	**100**	**5.146.807.000**	**100**	**4.331.722.643**	**100**	**3.780.903.145**	**100**	**3.546.556.851**	**75**	**2.133.303.616**			**100,00**	**85,89**	**100,00**	**95,42**	**100,00**	**73,05**	**75,00**	**45,14**		**0,00**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	10	4	36.627.000	4	50.000.000	4	21.600.000	4	19.153.000	4	27.036.000	2	36.627.000	4	48.870.750	4	21.515.900	10	18.994.000	7	21.526.580	0		100,00	97,74	100,00	99,61	250,00	99,17	175,00	79,62	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	17	60	4.088.308.000	12	3.675.909.000	12	3.120.929.000	12	3.335.483.000	12	3.969.231.000	12	4.088.308.000	12	3.339.494.282	12	2.952.811.713	17	2.592.908.048	12	1.467.381.339	0		100,00	90,85	100,00	94,61	141,67	77,74	100,00	36,97	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pendidikan pelatihan pegawai sesuai tugas dan fungsi	0	4	44.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	42.000.000	1	15.000.000	1	44.000.000	1	39.598.320	1	39.386.750	0		2		0		100,00	99,00	100,00	98,47	0,00		200,00		0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	14	12	1.923.339.000	12	541.000.000	12	199.554.000	12	566.870.000	12	49.860.000	12	203.029.000	12	283.135.765	12	199.169.123	14	162.337.535	12	122.552.177	0		100,00	52,34	100,00	99,81	116,67	28,64	100,00	245,79	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	14	89.688.000	0	10.000.000	3	15.125.000	3	128.613.000	4	77.591.000	4	89.688.000	0	9.973.600	3	15.000.000	3	51.393.500	5	120.835.560	0		0,00	99,74	100,00	99,17	100,00	39,96	125,00	155,73	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JJumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	378.259.000	12	380.500.000	12	247.153.000	12	403.673.000	12	358.785.000	12	378.259.000	12	270.553.863	12	235.961.718	12	414.384.284	12	273.876.460	0		100,00	71,10	100,00	95,47	100,00	102,65	100,00	76,33	0,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	18	36	306.896.000	36	345.732.000	36	318.148.000	36	359.202.000	36	227.987.000	36	306.896.000	36	340.096.063	36	317.057.941	18	306.539.484	9	127.131.500			100,00	98,37	100,00	99,66	50,00	85,34	25,00	55,76			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
																								Rata-rata capaian kinerja (%)	111,41	91,38	120,17	98,38	137,47	79,67	93,33	56,71	0,00	0,00	
																								Predikat Kinerja	ST	ST	ST	ST	ST	T	ST	R	SR	SR	

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Usulan tindak lanjut yang pada Renja Perangkat Daerah berikutnya:

Usulan tindak lanjut yang pada Renstra Perangkat Daerah berikutnya:

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										Unit Penanggungjawab
							1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		
1	2	3	4	5	6		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Urusan Pemerintahan Daerah																																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																											111,41	91,38	120,17	98,38	137,47	79,67	93,33	56,71	0,00	0,00	
Predikat Kinerja																											ST	ST	ST	ST	ST	T	ST	R	SR	SR	
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																					
Usulan tindak lanjut yang pada Renja Perangkat Daerah berikutnya:																																					
Usulan tindak lanjut yang pada Renstra Perangkat Daerah berikutnya:																																					

Disusun
Kebumen, 30 Juli 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kebumen

Sukamto, S.Sos,. M.T.
NIP. 196912241990011001